

**KAJIAN KETIMPANGAN EKONOMI WILAYAH ANTAR KABUPATEN KOTA DI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota
Strata Satu (S1)*

Oleh

Mardhotillah Astri

1510015311017

Pembimbing I : Ir. Hamdi Nur, M.T

Pembimbing II : Wenny Widya Wahyudi, SP, M.Si



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2022

UNIVERSITAS BUNG HATTA



**YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Kampus I : Jl. Sumatera Ulak Karang, Padang 25133 Telp. (0751) 7051678 – 7052096 Fax. 7055475
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Air Pacah, Padang 25176 Telp. (0751) 463250
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19, Olo Nanggelo, Padang 25143 Telp. (0751) 7054257 Fax : 7051341
e-mail : rektorat@bung-hatta.ac.id Website : www.bung-hatta.ac.id

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN**

TANDA PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : **MARDHOTILLAH ASTRI**

NPM : **1510015311017**

Judul Tugas Akhir : **Kajian Ketimpangan Ekonomi Wilayah Antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat**

Padang, 2 Maret 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Ir. Hamdi Nur, MTP

Wenny Widya Wahyudi, SP., M.Si

Disetujui Oleh :

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Dekan

Diketahui Oleh :

Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota
Ketua Jurusan



Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc.

Era Triana, S.T., M.Sc., Ph.D

KAJIAN KETIMPANGAN EKONOMI WILAYAH ANTAR KABUPATEN KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Mardhotillah Astri⁽¹⁾, Ir. Hamdi Nur, S.T, M.TP⁽²⁾, Wenny Widya Wahyudi, S.P, M.Si⁽³⁾

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Universitas Bung Hatta

Email : mardhotillahastri@gmail.com ⁽¹⁾, hamdinur66@gmail.com ⁽²⁾, wennywidyaw@bunghatta.ac.id ⁽³⁾

Abstrak

Ketimpangan merupakan hal umum yang terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah karena adanya perbedaan kondisi pada masing-masing wilayah. Ketimpangan wilayah adalah kondisi kesenjangan atau ketidakmerataan di suatu wilayah, sehingga menimbulkan selisih antar wilayah. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Di Provinsi Sumatera Barat, Perbedaan tersebut dapat dilihat dari adanya pertumbuhan ekonomi yang menurun dan selisih pendapatan perkapita yang cukup jauh antara wilayah dengan pendapatan perkapita tertinggi yaitu Kota Padang Panjang dan terendah yaitu Pesisir Selatan. Bahkan pendapatan perkapita di Kabupaten Pesisir Selatan lebih rendah dibandingkan pendapatan perkapita rata-rata di provinsi. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya kajian mengenai ketimpangan untuk mengetahui wilayah mana saja yang timpang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan tahap analisis yang diawali dengan mengidentifikasi kondisi ekonomi wilayah dari kontribusi sektor dan klasifikasi wilayah (Tipologi Klassen), setelah diketahui kondisi ekonomi kabupaten dan kota dilanjutkan dengan menganalisis ketimpangan di tingkat provinsi melalui Indeks Williamson, sementara di tingkat kabupaten kota melalui selisih pendapatan perkapita kabupaten kota terhadap rata-rata provinsi Hasil dari analisis yaitu ketimpangan hanya terjadi di wilayah kabupaten saja, dengan pola ketimpangan. Kemudian ditemukan adanya hubungan yang berlawanan arah antara kontribusi sektor Primer terhadap ketimpangan, dan adanya hubungan yang searah antara kontribusi sektor Tersier dan ketimpangan.

Kata Kunci : Kontribusi Sektor, Indeks Williamson, Ketimpangan Wilayah

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur atas segala ridho dan rahmat yang berlimpah dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam masa studi, dengan judul “Kajian Ketimpangan Ekonomi Wilayah Antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat”. Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta.

Perjalanan yang sangat panjang telah penulis lalui dalam proses penyelesaian penulisan tugas akhir ini. Berbagai hal yang dihadapi, dan berkat keendak-Nyalah sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Semua ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dari orang-orang tercinta di sekeliling penulis. Dengan kerendahan hati rasa terima kasih yang sangat mandalam penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT, karena atas ridho dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir.
2. Kedua orang tua tercinta Mama dan Papa, abang dan adik-adik tersayang, serta dukungan yang sangat berarti dari keluarga besar sebagai *support system* yang selalu memberikan dukungan dan semangat tiada henti-hentinya selama proses kuliah hingga penyelesaian tugas besar.
3. Bapak Ir. Hamdi Nur, MTP selaku dosen pembimbing I yang selalu bersedia memberikan waktu dan arahan selama proses bimbingan untuk menyelesaikan tugas akhir.
4. Ibu Wenny Widya Wahyudi, S.P, M.Si selaku dosen pembimbing II yang selalu bersedia memberikan waktu dan arahan selama proses bimbingan untuk menyelesaikan tugas akhir.
5. Ibu Harne Julianti Tou, S.T, M.T, selaku dosen penguji I, terimakasih atas waktu masukan dan arahnya.
6. Ibu Nori Yusri, S.T, M.T, selaku dosen penguji I, terimakasih atas waktu masukan dan arahnya.
7. Seluruh Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bung Hatta atas ilmu, pengalaman dan arahan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

8. Rekan-rekan Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2015, terimakasih atas segala semangat dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Abang-abang, kakak-kakak dan adik-adik mahasiswa/i Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP Universitas Bung Hatta.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan dan penyelesaian tugas akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga hal-hal baik senantiasa mengiringi kita. Penulis sangat menyadari bahwa tugas akhir ini masih terdapat banyak kesalahan karena keterbatasan yang penulis miliki, Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga tugas akhir yang telah diselesaikan dengan sepuh hati ini dapat memberikan manfaat untuk pembaca sekalian.

Padang, Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	2
1.4 Batasan Penelitian	2
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	3
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah	3
1.5.2 Ruang Lingkup Materi	5
1.6 Metodologi Penelitian.....	5
1.6.1 Metode Pengumpulan Data	5
1.6.2 Variabel Penelitian	5
1.6.3 Metode Analisa Data	6
1.6.3.1 Identifikasi Kondisi Ekonomi Kabupaten Kota	6
1.6.3.2 Analisis Ketimpangan Ekonomi	7
1.7 Sistematika Penulisan	9
1.8 Keluaran	9
BAB II STUDI LITERATUR	11
2.1 Pembangunan Wilayah	11
2.2 Ketimpangan Wilayah	12
2.2.1 Pengertian Ketimpangan Wilayah	13
2.2.2 Bentuk Ketimpangan Wilayah	14
2.2.3 Penyebab Ketimpangan	15
2.2.4 Pengukuran Ketimpangan	18
2.3 Penelitian Terdahulu	19
2.4 Variabel Penelitian	20
2.4.1 Pertumbuhan Ekonomi	20
2.4.2 Pendapatan Perkapita	22
2.4.3 Kontribusi Sektor	22
2.5 Tipologi Klassen	24
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH	26
3.1 Provinsi Sumatera Barat	26
3.2 Kependudukan	29
3.2.1 Jumlah Penduduk	29
3.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk	30
3.3 Ekonomi	32
3.3.1 Produk Domeatik Regional Bruto	32
3.3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi	33
3.3.3 Pendapatan Perkapita	34
BAB IV ANALISIS	36

4.1	Identifikasi Kondisi Ekonomi Kabupaten dan Kota	36
4.1.1	Kontribusi Sektor	36
4.1.2	Klasifikasi Wilayah	40
4.2	Analisis Ketimpangan Ekonomi Wilayah	49
4.3	Kesimpulan Analisis	64
	BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	66
5.1	Kesimpulan Penelitian	66
5.2	Rekomendasi	67
	DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat	4
Gambar 1.2 Kerangka Berpikir	10
Gambar 3.1 Peta Administrasi Wilayah Provinsi Sumatera Barat	28
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten dan Kota Tahun 2011-2020	31
Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2020	34
Gambar 4.1 Grafik Indeks Williamson di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2020	51

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Variabel Penelitian	5
Tabel 1.2 Rincian Pembagian Jenis Sektor	6
Tabel 1.3 Matriks Tipologi Klassen	7
Tabel 1.4 Kriteria Ketimpangan Indeks Williamson	8
Tabel 2.1 Kriteria Ketimpangan Indeks Williamson	18
Tabel 2.2 Variabel Penelitian	20
Tabel 2.3 Rincian Pembagian Jenis Sektor	23
Tabel 2.4 Matriks Tipologi Klassen	24
Tabel 3.1 Luas Wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat	29
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2020	30
Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2020	30
Tabel 3.4 PDRB ADHK Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2020	32
Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2020	33
Tabel 3.6 PDRB Perkapita Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2020	34
Tabel 4.1 Rincian Pembagian Jenis Sektor	37
Tabel 4.2 Kontribusi Sektor di Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2020	38
Tabel 4.3 Perubahan Klasifikasi Wilayah di Kabupaten dan Kota Tahun 2011	40
Tabel 4.4 Perubahan Klasifikasi Wilayah di Kabupaten dan Kota Tahun 2015	41
Tabel 4.5 Perubahan Klasifikasi Wilayah di Kabupaten dan Kota Tahun 2019	43
Tabel 4.6 Perubahan Klasifikasi Wilayah di Kabupaten dan Kota Tahun 2020	45
Tabel 4.7 Perubahan Klasifikasi Wilayah di Kabupaten dan Kota Tahun 2011- 2020.....	47
Tabel 4.8 Perubahan Klasifikasi Wilayah dan Sektor Utama di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2020	48
Tabel 4.9 Kriteria Ketimpangan Indeks Williamson	50
Tabel 4.10 Indeks Williamson Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2020	50
Tabel 4.11 Selisih Pendapatan Perkapita Kabupaten Kota Terhadap Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2020	52
Tabel 4.12 Pola I Grafik Selisih Pendapatan Perkapita Terhadap Provinsi	54
Tabel 4.13 Pola II Grafik Selisih Pendapatan Perkapita Terhadap Provinsi	57
Tabel 4.14 Pola III Grafik Selisih Pendapatan Perkapita Terhadap Provinsi	61
Tabel 4.15 Kesimpulan Hasil Analisis	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tantangan dalam pembangunan di Indonesia adalah mengatasi ketimpangan. Ketimpangan merupakan hal umum yang terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah karena adanya perbedaan kondisi pada masing-masing wilayah. Ketimpangan wilayah adalah kondisi kesenjangan atau ketidakmerataan di suatu wilayah, sehingga menimbulkan selisih antar wilayah. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di pesisir Pulau Sumatera, terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota yang masih terus melakukan upaya pembangunan. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Data dari BPS Provinsi Sumatera Barat menunjukkan angka laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2018-2020 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang menurun. Selain itu data pendapatan perkapita menunjukkan adanya selisih yang cukup jauh antara wilayah dengan pendapatan perkapita tertinggi yaitu Kota Padang Panjang dengan perkapita terendah bahkan di Kabupaten Pesisir Selatan, dan masih banyak kabupaten yang memiliki pendapatan perkapita dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Ketika dua hal terpenting dalam pembangunan yaitu pertumbuhan dan pemerataan belum tercapai, maka akan timbul suatu ketimpangan (Sirojuzilam, 2005).

Ketimpangan menyebabkan pembangunan yang tidak merata, jika dibiarkan akan menghambat daerah didalamnya untuk berkembang. Hal tersebut menjadi alasan kuat untuk mengkaji ketimpangan wilayah. Dalam penelitian ini, sebelum mengkaji ketimpangan wilayah yang ada, akan dilihat terlebih dahulu bagaimana kondisi perekonomian dari tiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat sebab kondisi yang terjadi di Provinsi secara keseluruhan tidak terlepas dari wilayah-wilayah yang ada di dalamnya. Dari teridentifikasinya kondisi ekonomi yang ada, kemudian barulah dikaji mengenai ketimpangannya.

Ketimpangan yang terjadi jika dibiarkan akan semakin melebar dan akan semakin parah, hingga menghambat pembangunan di suatu wilayah. Dengan alasan tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul “Kajian Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi perekonomian dan ketimpangan ekonomi antar kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi ekonomi dan ketimpangan ekonomi antar kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.

1.3.2 Sasaran

Sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Dari tujuan yang telah dipaparkan diatas, maka sasaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Menghitung kontribusi sektor
- b. Mengidentifikasi klasifikasi wilayah
- c. Menganalisis ketimpangan ekonomi

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya membahas ketimpangan kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat dari aspek ekonomi. Diawali dengan mengidentifikasi kondisi ekonomi dari kontribusi sektor dan klasifikasi wilayah dari tipologi klassen. Kemudian ketimpangan provinsi dihitung dengan Indeks Williamson dan ketimpangan kabupaten kota melalui selisih pendapatan perkapita. Penelitian ini mengamati perubahan dalam jangka panjang yaitu 10 tahun yang dipisah menjadi 4 titik tahun yaitu 2011, 2015, 2019 dan 2020. Hal ini karena pada tahun 2020 terlihat adanya perubahan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

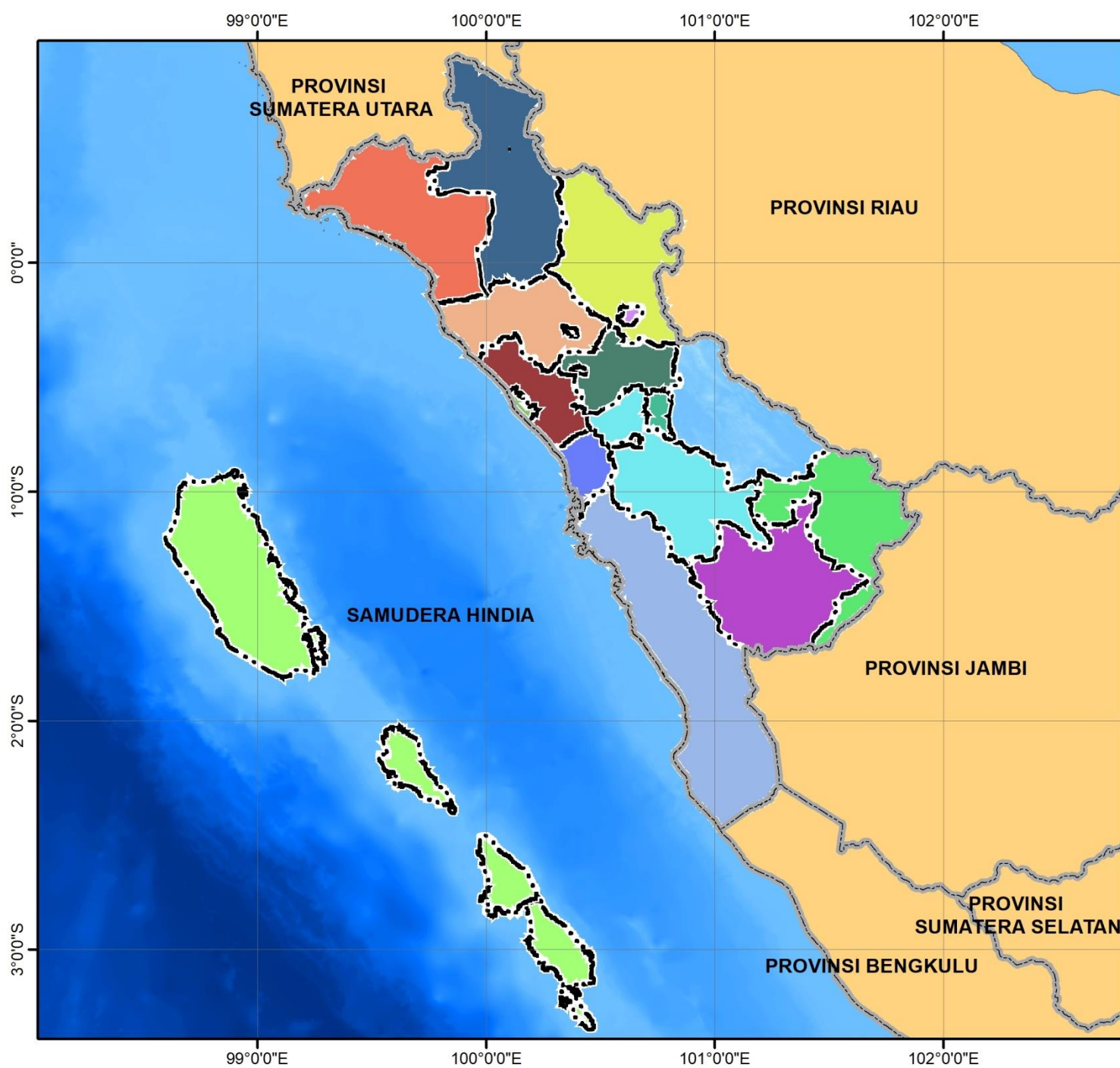
1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian dilakukan dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat, dengan total luas wilayah 4.201.289 ha yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota. Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5.498.751 jiwa. Provinsi Sumatera Barat memiliki luas administrasi wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau
Sebelah Selatan	: Provinsi Bengkulu
Sebelah Timur	: Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu
Sebelah Barat	: Samudera Hindia

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat berikut ini.



TUGAS AKHIR

**Peta Administrasi
Provinsi Sumatera Barat**

1:2.500.000

LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kab./Kota

Perairan

- Laut

Kabupaten/Kota

Kab. Agam	Kab. Solok Selatan
Kab. Dharmasraya	Kab. Tanah Datar
Kab. Kep. Mentawai	Kota Bukittinggi
Kab. Limapuluh Kota	Kota Padang
Kab. Padang Pariaman	Kota Padang Panjang
Kab. Pasaman	Kota Pariaman
Kab. Pasaman Barat	Kota Payakumbuh
Kab. Pesisir Selatan	Kota Sawahlunto
Kab. Sawahlunto/Sijunjung	Kota Solok
Kab. Solok	

Dibuat Oleh:
MARDHOTILLAH ASTRI
1510015311017

Pembimbing 1: Ir. Hamdi Nur, M.T
Pembimbing 2: Wenny Widya Wahyudi, SP, M.Si

Peta Inset

Sumber:
Peta Rupa Bumi Indonesia 1:2.500.000

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pada penelitian adalah kontribusi sektor di kabupaten dan kota, Tipologi Klassen di kabupaten dan kota, Indeks Williamson di Provinsi Sumatera Barat, dan selisih pendapatan perkapita kabupaten kota terhadap Provinsi Sumatera Barat.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan cara sebagai berikut.

1) Survey Instansi

Penulis melakukan survey ke instansi yang menyediakan data yang dibutuhkan terkait penelitian yang bersumber dari :

- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, berupa data PDRB Kabupaten dan Kota Harga Konstan, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan jumlah penduduk dari publikasi Provinsi Dalam Angka dan Kabupaten Kota Dalam Angka Tahun 2011-2020
- BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat, berupa Data RTRW Peta Administrasi Provinsi

2) *Library Reasearch*

Penulis melakukan pengumpulan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, bersumber dari buku, jurnal penelitian atau artikel ilmiah, data dari internet dan lain-lain.

1.6.2 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Alasan Pemilihan Variabel
Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan atau peningkatan nilai tambah kegiatan ekonomi di suatu daerah, dilihat dari PDRB Harga Konstan	Variabel dipilih karena merupakan indikator pembangunan, untuk melihat kondisi ekonomi wilayah
Pendapatan Perkapita	PDRB perkapita adalah pendapatan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.	Variabel dipilih karena merupakan indikator pembangunan mengukur rata-rata pendapatan yang diterima penduduk di wilayah studi, dan merupakan salah satu indikator dalam perhitungan ketimpangan wilayah
Kontribusi Sektor	Peran pendapatan sektor terhadap pendapatan wilayah	Variabel dipilih untuk mengetahui kondisi ekonomi wilayah

Sumber : Analisis dari Studi Literatur dan Penelitian Terdahulu

1.6.3 Metode Analisa Data

Penelitian ini berjenis deskriptif kuantitatif, dimana metode kuantitatif digunakan untuk perhitungan statistik sederhana dan rumus yang digunakan dalam tahap analisis, sedangkan metode deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran atau kesimpulan dari analisis dalam kalimat, tabel maupun gambar sehingga mudah untuk dipahami. Berikut merupakan tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian.

1.6.3.1 Identifikasi Kondisi Ekonomi Kabupaten Kota

Identifikasi kondisi ekonomi digunakan untuk mengetahui kontribusi sektor dan klasifikasi kabupaten kota. Berikut uraian metode yang digunakan dalam analisis pada penelitian ini.

a. Kontribusi Sektor

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sektor mana yang berkontribusi paling besar terhadap perekonomian kabupaten dan kota. Tahap yang dilakukan untuk mengetahui kontribusi sektor adalah menghitung kontribusi dari 17 lapangan usaha penyusun PDRB per tahun terlebih dahulu, menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi sektor} = \frac{\text{PDRB lapangan usaha } i \text{ di kab/kota}}{\text{PDRB kab/kota}} \times 100$$

Setelah diketahui kontribusi dari 17 lapangan usaha, maka kelompokkan menjadi 3 kelompok sektor berdasarkan jenisnya yaitu : Primer, Sekunder, dan Tersier dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.2
Rincian Pembagian Jenis Sektor

No	Sektor	Lapangan Usaha
1	Primer	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
		B. Pertambangan dan Penggalian
2	Sekunder	C. Industri Pengolahan
		F. Konstruksi
		D. Pengadaan Listrik dan Gas
		E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
3	Tersier	H. Transportasi dan Pergudangan
		I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		J. Informasi dan Komunikasi
		G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		K. Jasa Keuangan dan Asuransi
		L. Real Estate
		M, N Jasa Perusahaan
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		

No	Sektor	Lapangan Usaha
		P. Jasa Pendidikan
		Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
		R,S,T,U Jasa Lainnya

Sumber : Analisis Studi Literatur Tahun 2021

b. Tipologi Klassen

Untuk mengetahui klasifikasi wilayah digunakan metode analisis Tipologi Klassen. Analisis Tipologi kelas dalam penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita kabupaten kota dibandingkan dengan provinsi, dari nilai tersebut diketahui kabupaten kota menempati kuadran berapa dalam klasifikasi wilayah. Berikut merupakan matriks tipologi kelas.

Tabel 1.3
Matriks Tipologi Klassen

Laju Pertumbuhan Ekonomi (r)	PDRB Perkapita (Y)	
	Yi > Y	Yi < Y
ri > r	Kuadran I Wilayah maju dan cepat tumbuh (High Grow and High Income)	Kuadran III Wilayah berkembang cepat (High grow but low income)
ri < r	Kuadran II Wilayah maju tapi tertekan (Low growth but high income)	Kuadran IV Wilayah relative tertinggal (low growth and low income)

Sumber : Studi Literatur Tahun 2021

Keterangan :

Ri = Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

R = Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi

Yi = PDRB Perkapita Kabupaten/Kota

Y = PDRB Perkapita Provinsi

1.6.3.2 Analisis Ketimpangan Ekonomi

Analisis ini diawali dengan menghitung nilai ketimpangan di Provinsi Sumatera Barat dengan Indeks Williamson sehingga diketahui nilai ketimpangan tahun 2011-2020, selanjutnya untuk mengetahui ketimpangan antar kabupaten kota dilihat melalui nilai selisih pendapatan perkapita kabupaten kota terhadap provinsi.

a. Indeks Williamson

Untuk mengetahui ketimpangan di provinsi diukur dengan menggunakan Indeks Williamson (IW), dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Indeks Williamson} = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Keterangan :

Y_i = PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Y = PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat

f_i = Jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

n = Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat

Dalam penelitian ini menghitung ketimpangan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2020, sehingga diketahui perkembangan dan kategori dari ketimpangan tersebut. Berikut merupakan kriteria Indeks Williamson.

Tabel 1.4
Kriteria Ketimpangan Indeks Williamson

Nilai Indeks Williamson	Kriteria
0,1 – 0,35	Ketimpangan rendah
0,35 – 0,50	Ketimpangan sedang
>0,5	Ketimpangan tinggi

Sumber : Studi Literatur Tahun 2021

b. Selisih Pendapatan Perkapita Kabupaten Kota Terhadap Provinsi

Setelah diketahui ketimpangan di provinsi maka langkah selanjutnya mencari ketimpangan antar kabupaten kota dengan melihat selisih pendapatan perkapita kabupaten kota terhadap dengan provinsi, sehingga diketahui wilayah mana yang paling timpang dan wilayah mana yang menyebabkan meningkatnya ketimpangan di provinsi. berikut merupakan cara mencari selisih pendapatan perkpaita kabupaten kota dengan provinsi.

$$\text{Selisih Pendapatan Perkapita} = Y_i - Y$$

Keterangan :

Y_i = Pendapatan Perkapita kabupaten/kota

Y = Pendapatan Perkapita provinsi

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sasaran penelitian, batasan penelitian, metode penelitian ruang lingkup materi dan wilayah, sistematika penulisan dan keluaran.

BAB II STUDI LITERATUR

Bab ini berisi tentang literatur dan teori-teori yang berkaitan dan menjadi dasar dalam penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang kondisi eksisting wilayah studi dan data-data yang berkaitan dengan penelitian.

BAB IV ANALISIS

Bab ini berisi tentang analisis yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi wilayah berdasarkan pola dan struktur ekonomi, kemudian untuk melihat ketimpangan ekonomi wilayah yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat.

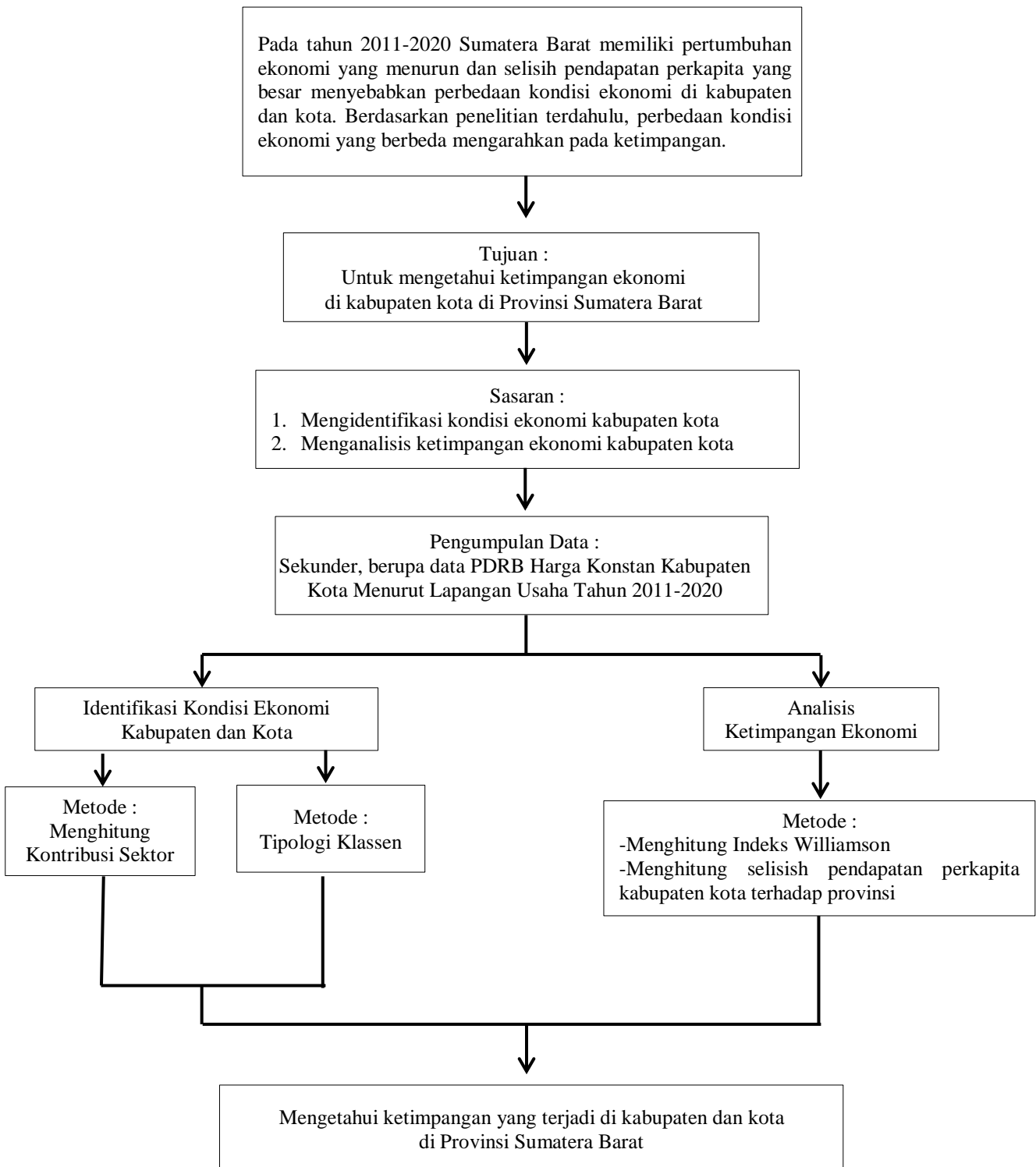
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi tentang temuan yang disimpulkan dari hasil analisis pada bab sebelumnya dan rekomendasi untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

1.8 Keluaran

Keluaran pada penelitian ini adalah untuk mengetahui ketimpangan antar kabupaten kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka berpikir penelitian di bawah ini.

Gambar 1.2
Kerangka Berpikir



BAB II

STUDI LITERATUR

2.1 Pembangunan Wilayah

Berikut merupakan pendapat beberapa ahli mengenai pengertian pembangunan. Berikut pendapat beberapa ahli mengenai pengertian pemabngunan wilayah.

a. Ernan Rustiadi

Pembangunan wilayah dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara atau wilayah untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya.

b. Muhammad Ali

Pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikan taraf hidup, kesejahteraan dan kualitas manusia.

c. Portes

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, melalui transformasi ekonomi, sosial dan budaya.

Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan secara keseluruhan yang terencana tanpa mengabaikan kebutuhan dasar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Tujuan pembangunan adalah utnuk mengarahkan pada (Anwar, 2001) :

- 1) *Growth/efficiency* yang mendukung pertumbuhan ekonomi
- 2) *Equity* dimana pembangunan tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja agar manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak.
- 3) *Sustainability* yaitu pembangunan yang berkelanjutan

Pembangunan wilayah salah satunya dilihat dari aspek ekonomi, dimana pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita disertai dengan perubahan dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk pada suatu negara (Bappeda Kab. Buleleng, 2017). Pembangunan ekonomi meliputi proses pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan perubahan salah satunya dalam sturktur ekonomi (Banendro, 2016) dengan salah satu

tolak ukur keberhasilannya adalah peningkatan pendapatan regional (Lutfi Muta'ali 2015).

Dari penjelasan beberapa sumber diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah proses meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, pendapatan total dan pendapatan perkapita, serta pemerataannya.

2.2 Ketimpangan Wilayah

Tolok ukur keberhasilan pembangunan dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Pertumbuhan suatu wilayah tidak serta merta dapat menimbulkan pertumbuhan yang sama didaerah lainnya. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antardaerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antardaerah semakin besar (Amala, 2018). Tidak adanya pemerataan dalam proses pembangunan akan mengakibatkan kesenjangan atau ketimpangan antar daerah. Dua hal terpenting dalam pembangunan, yaitu menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan (Sirojuzilam, 2005), oleh karena itu pembangunan harus diarahkan kepada pemerataan, pertumbuhan dan keberlanjutan.

Ketimpangan antar wilayah atau antar daerah menyebabkan timbulnya kecemburuan sosial dan timbulnya disparitas ekonomi yang semakin parah. Kemampuan tiap wilayah untuk membangun masing-masing wilayahnya berbeda, karena dipengaruhi oleh perbedaan potensi sumber daya manusia dan alam di tiap wilayah. Daerah yang mengalami keterbatasan dalam hal tersebut mempunyai ketergantungan kuat dengan daerah luar, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan wilayah.

Ketimpangan wilayah merupakan hal yang umum terjadi, namun ketimpangan akan semakin memberikan dampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan wilayah jika dibiarkan. Dampak tersebut seperti inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas serta kesenjangan yang tinggi dipandang tidak adil oleh kabupaten dan kota lain. Dampak lainnya yang dapat ditimbulkan dari ketimpangan yaitu kemiskinan yang parah serta meningkatnya angka pengangguran.

Sependapat dengan Basri (2002), Dumairy (1996) juga menjelaskan bahwa kesenjangan wilayah merupakan sebuah kondisi dimana terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar wilayah yang dilihat dari permasalahan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta rendahnya akses masyarakat terhadap sarana prasarana ekonomi dan sosial. Rustiadi (2008) juga mengungkapkan bahwa kesenjangan wilayah yang terjadi di negara berkembang lebih dikarenakan adanya perbedaan daerah yang mampu menarik investasi yang tinggi, angkatan kerja, perbedaan distribusi infrastruktur sosial dan ekonomi, perbedaan pendapatan per kapita, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan migrasi. Perbedaan kondisi tersebut menyebabkan kesejahteraan antar wilayah mengalami perbedaan.

2.2.1 Pengertian Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan wilayah merupakan hal yang umum dalam pembangunan. Beberapa ahli memiliki pendapatn mengenai ketimpangan wilayah, diantaranya sebagai berikut.

a. Williamson (1965)

Ketimpangan wilayah merupakan perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang disebabkan karena adanya perbedaan dalam sumberdaya dan awal pelaksanaan pembangunan antar wilayah.

b. Kuncoro (2006)

Kesenjangan atau ketimpangan mengacu pada standar hidup relatif masyarakat, yang terjadi karena perbedaan faktor anugerah awal.

c. Sakirno

Perbedaan faktor anugerah awal menyebabkan perbedaan tingkat pembangunan di setiap daerah, menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah.

d. Kutscheraurer (2010)

Adanya perbedaan kinerja ekonomi dan kesejahteraan antar wilayah, kondisi tersebut menyebabkan kesenjangan atau ketimpangan.

e. Basri (2002)

Ketimpangan antar wilayah terjadi karena adanya jarak ekonomis dan sumberdaya manusia antar wilayah sebagai akibat dari pembangunan. Jarak ekonomis yang dimaksud dalam hal ini adalah perbedaan pertumbuhan wilayah, selain itu

kesenjangan wilayah juga ditandai dengan perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antara wilayah terpencil, perbatasan serta wilayah tertinggal.

Dari pendapat ahli diatas maka disimpulkan pengertian ketimpangan wilayah adalah adanya perbedaan kondisi di tiap wilayah sehingga kemampuan dalam pembangunan berbeda-beda, yang menyebabkan selisih dan ketimpangan antar wilayah.

2.2.2 Bentuk Ketimpangan Wilayah

Menurut Mubyarto (1995) ketimpangan dibedakan menjadi beberapa bentuk ketimpangan yaitu :

- 1) Ketimpangan antar sektor, biasanya dilihat dari sektor industry dan pertanian sebagai penggerak perekonomian
- 2) Ketimpangan antar daerah, akibat perbedaan sumber daya yang dimiliki
- 3) Ketimpangan antar golongan ekonomi, merupakan ketimpangan terberat dan sangat mungkin terjadi dalam sistem perekonomian.

Menurut Wishlade dan Yuill (1997), permasalahan ketimpangan di tiap negara secara umum dilihat dari :

- a) Aspek Fisik, berkaitan dengan kondisi geografis atau alam
- b) Aspek Ekonomi, berkaitan dengan perbedaan kualitas atau kuantitas output daerah
- c) Aspek Sosial, berhubungan dengan kualitas dari penduduk

Sementara itu, Lay (1993) menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis tipe kesenjangan wilayah yaitu :

- a) Aspek Fisik, berkaitan dengan ketersediaan sarana prasarana sosial ekonomi
- b) Aspek Ekonomi, berkaitan dengan kemampuan ekonomi suatu daerah
- c) Aspek Sosial, berkaitan dengan kualitas penduduk di suatu daerah

Menurut Nurzaman dalam Yeni Ratnasari (2014) kesenjangan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dilihat menggunakan beberapa indikator seperti :

- 1) Pendapatan wilayah yang dapat dilihat dari Jumlah PRDB per kapita
- 2) Investasi yang dapat dilihat dari jumlah investasi di suatu wilayah
- 3) Kinerja ekonomi dilihat dari kontribusi sektor industry manufaktur terhadap PDRB total

- 4) Pertumbuhan ekonomi dilihat dari laju pertumbuhan PDRB suatu wilayah
- 5) Tenaga kerja dilihat dari jumlah angkatan kerja pada masing-masing wilayah
- 6) Infrastruktur ekonomi yang dilihat dari ketersediaan sarana prasarana yang mendukung kegiatan perekonomian seperti kondisi jalan suatu wilayah

Tambunan (2001) dalam Yeni Ratnasari (2014) menambahkan ketimpangan wilayah salah satunya dalam aspek ekonomi juga didasarkan pada indikator :

- 1) Pertumbuhan ekonomi untuk menggambarkan persentase laju pertumbuhan PDRB di tiap kabupaten kota. Melalui laju pertumbuhan ekonomi maka dapat diketahui peningkatan produktivitas di suatu wilayah, sebagai capaian target pembangunan ekonomi di suatu wilayah.
- 2) Konsentrasi kinerja ekonomi wilayah dapat dilihat juga dari ketidakmerataan pembagian kegiatan industri manufaktur. Hal ini dipertimbangkan karena industri manufaktur merupakan sektor ekonomi potensial dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDRB pada perkembangan ekonomi, dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.

Berdasarkan pendapat ahli maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan wilayah digolongkan menjadi ketimpangan ekonomi dan non ekonomi. Ketimpangan ekonomi berkaitan dengan pendapatan wilayah, masyarakat, sektoral. Ketimpangan non ekonomi dilihat dari segi fisik (sarana, prasarana karena adanya perbedaan geografis) dan segi kualitas penduduk.

2.2.3 Penyebab Ketimpangan

Menurut Syafrizal (2009) penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi wilayah diantaranya adalah :

- 1) Perbedaan kandungan sumber daya alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber

daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.

2) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Contohnya adalah terdapatnya sumberdaya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batubara dan bahan mineral lainnya. Terdapat lahan yang subur juga turut mempengaruhi, khususnya menyangkut pertumbuhan kegiatan pertanian. Meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara, juga ikut mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah.

3) Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem pemerintahan otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah. Untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta. Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transpor baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investasi akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

Menurut Tambunan faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan dari aspek ekonomi yaitu :

- 1) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah
- 2) Perbedaan sumber daya antar wilayah
- 3) Pola perdagangan antar daerah

Menurut Tulus (2001) faktor-faktor yang menyebabkan terjadi kesenjangan ekonomi adalah sebagai berikut.

1) Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar daerah. Ekonomi dari daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat, sedangkan daerah dengan konsentrasi ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

2) Alokasi Investasi

Menurut Harrod-Domar menerangkan bahwa ada korelasi positif antar tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa investasi rendah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita masyarakat rendah karena rendahnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.

3) Tingkat Mobilitas Faktor Produksi Rendah Antar Daerah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapital, merupakan faktor penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi regional. Realisasi antara mobilitas faktor produksi dan perbedaan tingkat pembangunan atau pertumbuhan antar daerah dapat lebih jelas dipahami dengan pendekatan analisis mekanisme pasar output dan pasar input.

4) Perbedaan Sumber Daya Alam

Dasar pemikiran klasik sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakat lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang miskin sumber daya alam.

Sementara itu, menurut BPS 2011 dalam Indeks Pembangunan Regional, menyatakan indikator aspek ekonomi terdiri dari :

- 1) Pendapatan dan urbanisasi (yang mempengaruhi daya beli dan pendapatan perkapita)
- 2) Kemampuan ekonomi dan investasi (yang mempengaruhi pembentukan modal, kontribusi sektor terhadap PDRB)

Menurut Ardani (1992), indikator yang sering digunakan dalam ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pendapatan perkapita rata-rata pada :

- 1) Antar kelompok tingkat pendapatan
- 2) Antar kelompok lapangan kerja
- 3) Antar wilayah

Beberapa faktor dari aspek ekonomi yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah (Ernan Rustiadi dkk, 2011) diantaranya terkait kekuatan pasar bebas mengakibatkan factor produksi dan aktivitas ekonomi memberikan hasil yang lebih baik dan lebih terkonsentrasi pada wilayah maju. Kawasan yang beruntung semakin berkembang, dan yang tidak beruntung semakin tertinggal.

2.2.4 Pengukuran Ketimpangan

Ketimpangan wilayah diukur dengan Indeks Williamson (IW). Indeks Williamson berguna untuk mengetahui ketimpangan antar wilayah dengan membandingkan PDRB perkapita dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut (Muta'ali, 2015). PDRB per kapita sebagai data dasar karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok. Hal yang dipersoalkan bukan antara kelompok kaya dan miskin, tetapi antara daerah maju dan terbelakang. Dari indeks Williamson dapat diketahui ketimpangan antar wilayah yang terjadi semakin melebar atau berkurang. Jika semakin tinggi nilai indeks Williamson berarti kesenjangan ekonomi antar wilayah semakin besar, dan sebaliknya. Adapun rumus Indeks Williamson adalah sebagai berikut.

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i/n}}{Y}$$

Keterangan :

IW = Nilai Indeks Williamson

Y_i = PDRB Perkapita Kabupaten/Kota

Y = PDRB Perkapita Provinsi

f_i = Jumlah penduduk Kabupaten/Kota

n = Jumlah penduduk Provinsi

Indeks Williamson memiliki tingkatan berdasarkan hasil perhitungannya, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Kriteria Ketimpangan Indeks Williamson

Nilai Indeks Williamson	Kriteria
0,1 – 0,35	Ketimpangan rendah
0,35 – 0,50	Ketimpangan sedang
>0,5	Ketimpangan tinggi

Sumber : Teknik Analisis Regional, Lutfi Muta'ali 2015

2.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa peneliti yang telah mengkaji masalah ketimpangan sebelumnya. Menurut Lili Masli (2009) dalam “Analisis Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat”, ketimpangan wilayah dianalisis dengan menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil dengan hasil faktor yang berpengaruh dalam ketimpangan adalah : Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB perkapita.

Dalam penelitian “Struktur Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Sumatera Barat” oleh Easbi Ikhsan dan Nadra Yudelsa Ratu, struktur ekonomi yang diamati membedakan wilayah menjadi 4 kelompok sesuai Tipologi Klassen dan tingkat ketimpangan termasuk rendah (0,275). Pada variabel yang diamati terdapat hubungan yang berlawanan antara tingkat ketimpangan dengan laju pertumbuhan PDRB, dimana laju pertumbuhan PDRB yang meningkat maka ketimpangan akan menurun dan berlaku sebaliknya yang dianalisis melalui korelasi Pearson.

Menurut S. Andy Cahyono dalam “Pertumbuhan Dan Ketimpangan Ekonomi Di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo tahun 2008-2013” (2015), variabel yang digunakan dalam penelitian adalah PDRB dan pendapatan perkapita. Dari hasil pengamatan menurut pertumbuhan ekonomi wilayah yang termasuk dalam DAS (bagian hilir, tengah dan hulu) dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan Tipologi Klassen. Kemudian untuk tingkat ketimpangan antar daerah dalam DAS Bengawan Solo dihitung menggunakan Indeks Williamson, dimana hasilnya ketimpangan tergolong tinggi dan mengalami peningkatan pada tahun 2008-2011.

Menurut Cyntia Mutiar Pasaribu dalam “Kajian Isu Pemekaran di Kota Medan (Tinjauan Berdasarkan Kondisi Ketimpangan Wilayah)”, faktor yang mempengaruhi ketimpangan adalah : Ekonomi (Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan PDRB), Sosial Kependudukan (Tingkat Pengangguran, Kemiskinan, Angka Migrasi), Pelayanan Infrastruktur.

Menurut Katrina Aprilia Suri (2017) dalam “Tipologi Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota Menggunakan Metode Multidimensional Scaling Di Pulau Timor” ketimpangan ekonomi dilihat dari PDRB Harga Konstan, Pendistribusian pendapatan perkapita, IPM, Sarana dan Prasarana.

2.4 Variabel Penelitian

Berdasarkan kajian literatur diatas maka dapat ditentukan variabel yang menjadi fokus dalam penelitian. Variabel yang diambil dalam penelitian ini hanya yang berasal dai aspek ekonomi yang terkait dengan kondisi ekonomi dan ketimpangan ekonomi, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Alasan Pemilihan Variabel
Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan atau peningkatan nilai tambah kegiatan ekonomi di suatu daerah.	Variabel dipilih karena merupakan indikator pembangunan, untuk melihat kondisi ekonomi wilayah
Pendapatan Perkapita	PDRB perkapita adalah pendapatan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.	Variabel dipilih karena merupakan indikator pembangunan mengukur rata-rata pendapatan yang diterima penduduk di wilayah studi, , dan merupakan salah satu ondikator dalam perhitungan ketimpangan wilayah
Kontribusi Sektor	Peran pendapatan sektor terhadap pendapatan wilayah	Variabel dipilih untuk mengetahui kondisi ekonomi wilayah

Sumber : Analisis dari Studi Literatur

2.4.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan perekonomian suatu daerah atau wilayah dalam menghasilkan barang-barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan di dalam maupun di luar wilayah atau daerah, maupun peningkatan pendapatan perkapita suatu wilayah sehingga ketimpangan tidak terjadi dan kesejahteraan tercapai (Banendro, 2016).

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro karena dinilai sebagai usaha menciptakan pemerataan ekonomi (*economic equality*) dan stabilitas ekonomi (*economic stability*) melalui redistribusi pendapatan (*income redistribution*) akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Tulus T.H. Tambunan, Perekonomian Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007). Pentingnya mengkaji pertumbuhan ekonomi karena jika tanpa pertumbuhan

maka tidak ada peningkatan kesejahteraan, lapangan kerja, kesempatan kerja, dan distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan aktivitas ekonomi yang dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Pertumbuhan ekonomi yang positif berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan, sedangkan pertumbuhan negatif berarti kegiatan ekonomi mengalami penurunan (Soeratno, Ekonomi Makro Pengantar, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yogyakarta, 2004).

Pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dalam skala kuantitatif dan diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan membandingkan PDRB tahun terakhir pengamatan dengan tahun sebelumnya, apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dipandang sebagai indikator yang menggambarkan tingkat kemajuan dan perkembangan ekonomi. Untuk memudahkan pemakaian data, maka hasil perhitungan PDRB disajikan menurut sektor ekonomi/lapangan usaha, dan dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- 1) PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan.
- 2) Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Dengan demikian perhitungan berdasarkan perkembangan riil dari kuantum produksi sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Data PDRB harga konstan adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi.

Dari perkembangan pertumbuhan ekonomi pada periode tertentu dapat pula dicermati keunggulan berbagai sektor ekonomi suatu daerah. Dengan demikian, perkembangan dan keunggulan berbagai sektor ekonomi suatu daerah dapat mempengaruhi perubahan struktur ekonominya.

Pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat memperlihatkan trend yang meningkat dan mantap dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian

yang berimbang dan dinamis dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih baik dari pada tahun sebelumnya. Daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar memiliki pertumbuhan daerah yang cenderung besar, kondisi inilah yang mendorong peningkatan tingkat pendapatan masyarakat (Syafrizal, 2009).

2.4.2 Pendapatan Perkapita

Pembangunan identik dengan upaya peningkatan pendapatan perkapita. Pendapatan Perkapita adalah pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Pendapatan tersebut diperoleh dengan membagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

Pendapatan perkapita merupakan ukuran taraf kesejahteraan secara makro, dilihat dari meningkatnya pendapatan perkapita. Semakin tinggi pendapatan perkapita maka semakin tinggi kesejahteraan di wilayah tersebut (Prathama Rahardja). Pendapatan perkapita merupakan indikator terpenting dalam menggambarkan perkembangan ekonomi di suatu wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan. Peningkatan PDRB Perkapita diharapkan dapat memecahkan permasalahan seperti pengangguran, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Semakin tinggi pendapatan perkapita, semakin tinggi pula tingkat perekonomian dan semakin maju suatu wilayah. Namun kemakmuran tersebut tidak hanya dari pendapatan perkapita saja karena ada jumlah penduduk yang diperhitungkan didalamnya, sehingga jika jumlah penduduk terlalu besar dapat memperkecil pendapatan perkapita (Lutfi, Muta'ali, 2015). Pengaruh pendapatan perkapita dan penduduk biasanya tidak menguntungkan, karena dinilai akan menambah beban dalam pendapatan perkapita.

2.4.3 Kontribusi Sektor

Kontribusi sektor menggambarkan dominansi peran suatu sektor terhadap perekonomian wilayah (Lutfi Muta'ali : Teknik Analisis Regional, 2015). Menurut Hady (2004) pendekatan yang bersifat sektoral merupakan suatu teknik dimana sektor-sektor yang dianggap potensial serta memberikan kontribusi yang besar serta ditetapkan sebagai sektor inti atau yang diutamakan, kemudian ditentukan titik dimana sektor tersebut akan dikembangkan.

Berdasarkan lapangan usaha maka sektor perekonomian di Indonesia dibedakan dalam 3 kelompok utama yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier (Sukirno dalam Lutfi Muta'ali 2015). Sektor primer adalah sektor yang berasal secara langsung dari sumber daya alam, terdiri dari lapangan usaha pertanian, peternakan kehutanan, perikanan, dan penggalian. Sektor primer adalah bagian terpenting didalam suatu negara berkembang, kemudian kepentingan itu menurun seiring dengan perkembangan negara tersebut menuju negara maju. Sektor Sekunder merupakan sektor ekonomi yang mengolah hasil dari sektor primer menjadi barang atau bahan baku untuk manufaktur dan konstruksi. Industri pada sektor ini dapat dibagi menjadi industri ringan dan industri berat. Sektor Tersier dikatakan juga sektor jasa, yaitu sektor yang produk akhirnya adalah jasa. Pembagian sektor dapat dilihat pada tabel dibawah ini (Erwin Saifulloh, 2020).

Tabel 2.3
Rincian Pembagian Jenis Sektor

No	Sektor	Lapangan Usaha
1	Primer	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
		B. Pertambangan dan Penggalian
2	Sekunder	C. Industri Pengolahan
		F. Konstruksi
		D. Pengadaan Listrik dan Gas
		E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
		H. Transportasi dan Pergudangan
3	Tersier	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		J. Informasi dan Komunikasi
		G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		K. Jasa Keuangan dan Asuransi
		L. Real Estate
		M,N Jasa Perusahaan
		O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
		P. Jasa Pendidikan
		Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
		R,S,T,U Jasa Lainnya

Sumber : Erwin Saifullah dalam Analisis Transformasi Struktur Perekonomian

Untuk mengetahui seberapa besar peran sektor dalam perkeonomian dihitung nilai kontribusi sektor dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi Sektor} = \frac{\text{PDRB Sektoral}}{\text{PDRB Wilayah}} \times 100$$

Sumber : Teknik Anslisis Regional Lutfi Muta'ali 2015

Interpretasi dari rumus adalah jika semakin besar perentase PDRB suatu sektor yang dihasilkan di wilayah, maka semakin besar (dominan) pula peran sektor dalam perekonomian wilayah tersebut.

Dalam perubahan struktur ekonomi menurut Mihnenoka dan Saulitis (2003) dalam kontribusi sektor primer secara agregat dalam jangka panjang akan menurun, sektor sekunder akan meningkat pada tahap awal kemudian akan konstan, dan proporsi sektor tersier akan terus meningkat. Sektor tersier yang merupakan sektor yang berkembang di tahap akhir dalam perkembangan perkeonomian dianggap menunjukkan kemajuan dari perekonomian di suatu wilayah. Semakin tinggi pendapatan perkapita semakin memacu kemampuan sektor tersier, sehingga semakin unggul dibandingkan sktor yang lain (Angel Gerda Pratiwi, 2016).

Menurut *Hukum Engels* (Diena Fahilah, 2010) bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka makin sedikit proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli barang pertanian, sebaliknya proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli barang-barang non pertanian.

2.5 Tipologi Klassen

Tipologi Klassen adalah model yang paling populer untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan perekonomian suatu wilayah dengan menggunakan basis data besaran pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi. Hasil tipologi kelas berupa klasifikasi wilayah yang menempati kuadran kuadran tertentu. Berikut formulasi dalam Analisis Tipologi Klassen, dalam hal ini untuk menentukan potensi perkembangan Ekonomi Wilayah.

Tabel 2.4
Matriks Tipologi Klassen

Laju Pertumbuhan Ekonomi (r)	PDRB Perkapita (Y)	
	$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
$r_i > r$	Wilayah maju dan cepat tumbuh (High Grow and High Income)	Wilayah berkembang cepat (High grow but low income)
$r_i < r$	Wilayah maju tapi tertekan (Low growth but high income)	Wilayah relative tertinggal (low growth and low income)

Sumber : Syafrizal 1997 dalam Lutfi Muta'ali, 2015

Keterangan :

R_i = Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

R = Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi

Y_i = PDRB Perkapita Kabupaten/Kota

Y = PDRB Perkapita Provinsi

Menurut tipologi Klassen diatas, wilayah dibagi menjadi empat klasifikasi sebagai berikut :

1. Wilayah maju dan cepat tumbuh (*High Grow and High Income*), wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan provinsi.
2. Wilayah maju tapi tertekan (*Low growth but high income*), wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih rendah tetapi pendapatan perkapita lebih tinggi dibandingkan provinsi.
3. Wilayah berkembang cepat (*High grow but low income*), wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi tetapi pendapatn perkapita lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi.
4. Wilayah relative tertinggal (*low growth and low income*), wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi.

BAB III

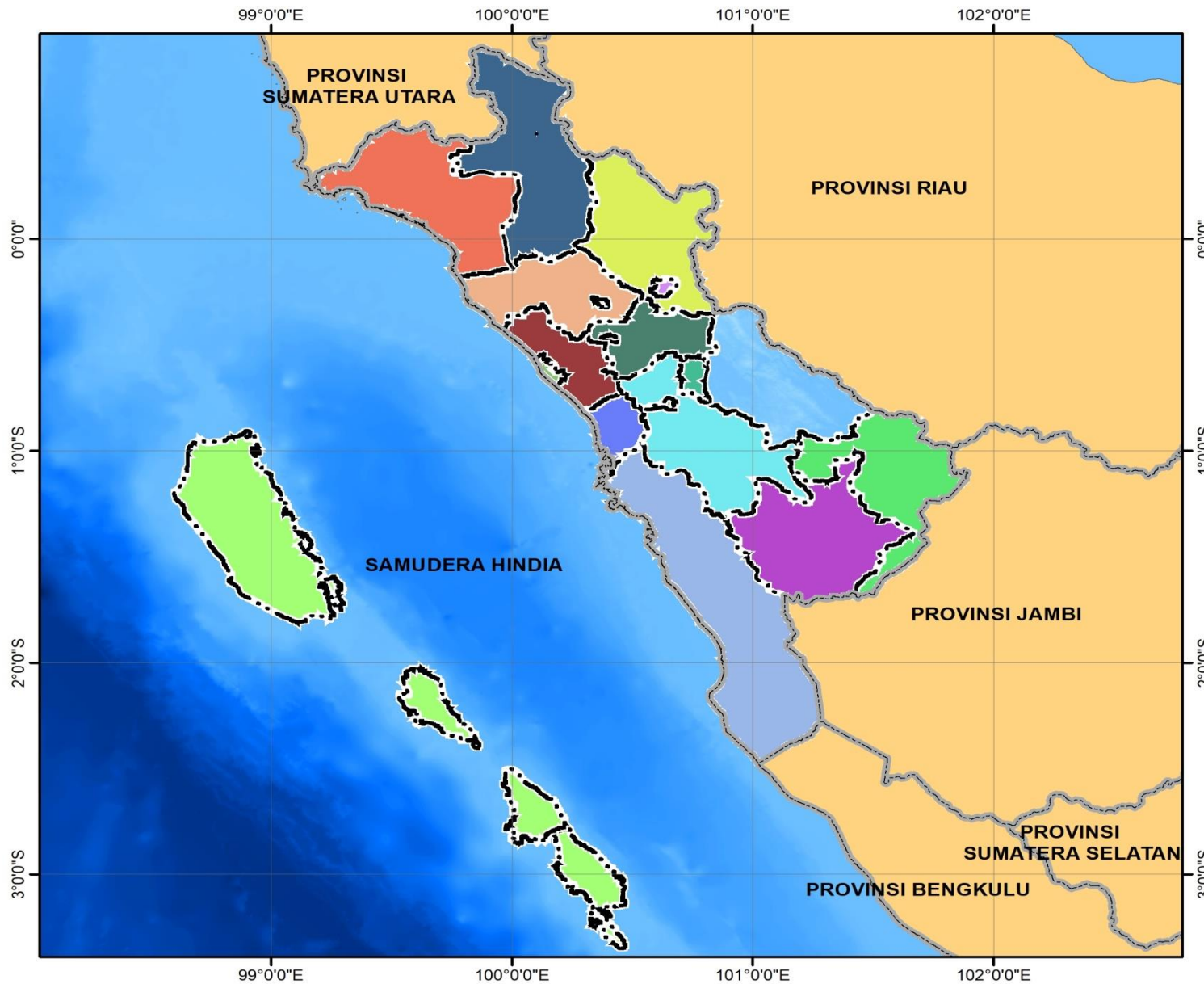
GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1 Administrasi dan Geografis

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Barat memiliki wilayah administrasi pemerintahan yang mencakup 12 kabupaten dan 7 kota, dengan beberapa kabupaten dan kota menduduki wilayah pesisir Pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Total luas wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat adalah 4.201.289 ha, secara geografis terletak antara 0°54' Lintang Utara dan 3°30' Lintang Selatan dan antara 98°36' - 101°53' Bujur Timur. Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4.865.331 jiwa pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 5.441.197 jiwa pada tahun 2020. Berikut merupakan batasan administrasi wilayah di Provinsi Sumatera Barat.

Sebelah Utara	: Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau
Sebelah Selatan	: Provinsi Bengkulu
Sebelah Timur	: Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu
Sebelah Barat	: Samudera Hindia

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.1 Peta Administrasi Wilayah Provinsi Sumatera Barat berikut ini.



TUGAS AKHIR	
Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat	
	1:2.500.000
LEGENDA	
Batas Administrasi	
Batas Provinsi Batas Kab./Kota	
Perairan	
Laut	
Kabupaten/Kota	
Kab. Agam Kab. Dharmasraya Kab. Kep. Mentawai Kab. Limapuluh Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Barat Kab. Pesisir Selatan Kab. Sawahlunto/Sijunjung Kab. Solok	Kab. Solok Selatan Kab. Tanah Datar Kota Bukittinggi Kota Padang Panjang Kota Pariaman Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok
Dibuat Oleh: MARDHOTILLAH ASTRI 15110015311017	
Pembimbing 1: Ir. Hamdi Nur, M.T Pembimbing 2: Wenny Widya Wahyudi, SP, M.Si	
Peta Inset 	
Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia 1:2.500.000	
JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS BUNG HATTA	

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari wilayah administrasi yang mencakup 12 kabupaten dan 7 kota dengan total luas wilayah 4.201.289 ha yang dapat dirincikan seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Luas Wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat

No	Wilayah	Luas Wilayah (ha)	Persentase Luas (%)
1	Kabupaten Kep. Mentawai	601.135	14,31
2	Kabupaten Pesisir Selatan	574.989	13,69
3	Kabupaten Solok	373.800	8,90
4	Kabupaten Sijunjung	313.040	7,45
5	Kabupaten Tanah Datar	133.610	3,18
6	Kabupaten Padang Pariaman	133.251	3,17
7	Kabupaten Agam	180.430	4,29
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	357.114	8,50
9	Kabupaten Pasaman	394.763	9,40
10	Kabupaten Solok Selatan	334.620	7,96
11	Kabupaten Dharmasraya	296.113	7,05
12	Kabupaten Pasaman Barat	388.777	9,25
13	Kota Padang	69.366	1,65
14	Kota Solok	7.129	0,17
15	Kota Sawahlunto	23.193	0,55
16	Kota Padang Panjang	2.300	0,05
17	Kota Bukittinggi	2.524	0,06
18	Kota Payakumbuh	8.522	0,20
19	Kota Pariaman	6.613	0,16
Sumatera Barat		4.201.289	100,00

Sumber : BPS Sumatera Barat Tahun 2021

Berdasarkan tabel luas wilayah diatas dapat dilihat wilayah yang paling luas di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sedangkan wilayah yang paling kecil adalah Kota Padang.

3.2 Kependudukan

3.2.1 Jumlah penduduk

Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili untuk menetap di suatu wilayah. Jumlah penduduk di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat meningkat pada tahun 2011-2020, dengan data jumlah penduduk pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2020

No	Wilayah	Tahun			
		2011	2015	2019	2020
1	Kab. Kep.Mentawai	78.215	85.295	92.021	87.623
2	Kab. Pesisir Selatan	434.884	450.186	463.923	504.418
3	Kab. Solok	352.814	363.684	373.414	391.497
4	Kab. Sijunjung	206.584	222.512	237.376	235.045
5	Kab. Tanah Datar	340.906	344.828	348.219	371.704
6	Kab. Padang Pariaman	395.420	406.076	415.613	430.626
7	Kab. Agam	460.818	476.881	491.282	529.138
8	Kab. Lima Puluh Kota	353.915	368.985	382.817	383.525
9	Kab. Pasaman	257.511	269.883	281.211	299.851
10	Kab. Solok Selatan	147.884	159.796	171.075	182.027
11	Kab. Dharmasraya	198.273	223.112	247.579	228.591
12	Kab. Pasaman Barat	375.314	410.307	443.722	431.672
13	Kota Padang	850.306	902.413	950.871	909.040
14	Kota Solok	60.904	66.106	71.010	73.438
15	Kota Sawahlunto	57.681	60.186	62.524	65.138
16	Kota Padang Panjang	47.982	50.883	53.693	56.311
17	Kota Bukittinggi	113.903	122.621	130.773	121.028
18	Kota Payakumbuh	119.372	127.826	135.573	139.576
19	Kota Pariaman	80.426	84.709	88.501	94.224
Provinsi Sumatera Barat		4.865.331	5.131.882	5.382.077	5.441.197

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Berdasarkan tabel data jumlah penduduk diatas dapat dilihat bahwa penduduk paling banyak di setiap tahun dalam rentang tahun 2011-2020 berada di Kota Padang, sementara penduduk paling sedikit berada di Kota Padang Panjang.

3.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data jumlah penduduk di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011-2020, didapat laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2011-2020 seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2020

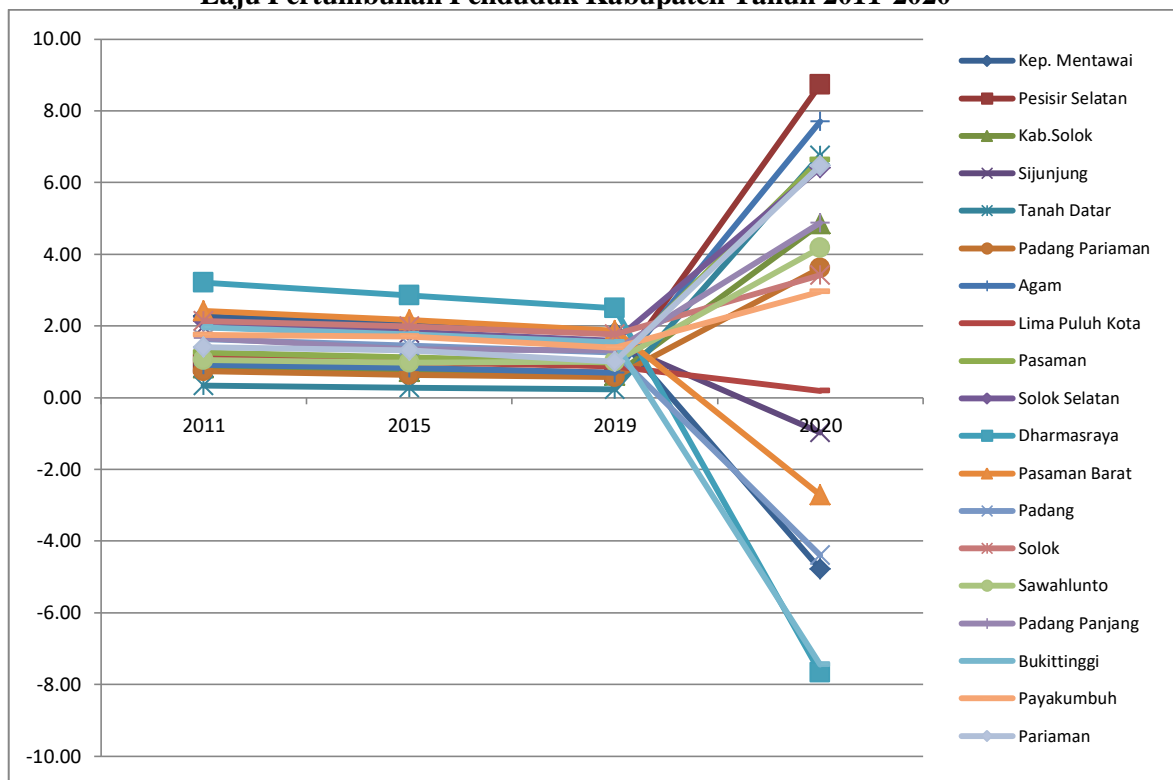
No	Wilayah	Tahun			
		2011	2015	2019	2020
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2.27	2.02	1.82	-4.78
2	Kabupaten Pesisir Selatan	0.92	0.83	0.70	8.73
3	Kabupaten Solok	0.83	0.72	0.62	4.84
4	Kabupaten Sijunjung	1.97	1.80	1.53	-0.98
5	Kabupaten Tanah Datar	0.33	0.28	0.23	6.74
6	Kabupaten Padang Pariaman	0.74	0.63	0.57	3.61
7	Kabupaten Agam	0.92	0.82	0.69	7.71
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	1.15	0.98	0.87	0.18

No	Wilayah	Tahun			
		2011	2015	2019	2020
9	Kabupaten Pasaman	1.26	1.12	0.98	6.63
10	Kabupaten Solok Selatan	2.13	1.85	1.58	6.40
11	Kabupaten Dharmasraya	3.21	2.85	2.49	-7.67
12	Kabupaten Pasaman Barat	2.41	2.16	1.86	-2.72
13	Kota Padang	1.63	1.44	1.25	-4.40
14	Kota Solok	2.13	1.99	1.77	3.42
15	Kota Sawahlunto	1.04	0.97	1.01	4.18
16	Kota Padang Panjang	1.66	1.34	1.32	4.88
17	Kota Bukittinggi	1.95	1.77	1.55	-7.45
18	Kota Payakumbuh	1.75	1.70	1.40	2.95
19	Kota Pariaman	1.41	1.31	1.00	6.47
Sumatera Barat		1.39	1.26	1.10	1.71

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel laju pertumbuhan penduduk diatas maka berikut grafik laju pertumbuhan penduduk kabupaten dan laju pertumbuhan penduduk kota pada tahun 2011-2020.

Gambar 3.2
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tahun 2011-2020



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Dari grafik dan tabel diatas dapat dilihat pertumbuhan penduduk di kabupaten dan kota pada tahun 2011-2019 menurun, terkecuali Kota Sawahlunto yang mengalami

fluktuasi. Sedangkan pada tahun 2020 menunjukkan perubahan laju pertumbuhan penduduk yang signifikan. Pada tahun 2020 terdapat beberapa wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman. Sementara beberapa wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang menurun pada tahun 2020 yaitu kabupaten dengan pertumbuhan penduduk yang menurun yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

3.3 Perekonomian

3.3.1 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto atau yang disingkat dengan PDRB merupakan indikator dalam melihat pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian ini data PDRB yang digunakan adalah PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) kabupaten dan kota tahun 2011-2020 seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
PDRB ADHK Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2020

No	Wilayah	PDRB ADHK (juta rupiah)			
		2011	2015	2019	2020
1	Kab. Kep.Mentawai	2.006.548,63	2.483.571,61	3.011.724,37	2.956.007,63
2	Kab. Pesisir Selatan	6.234.822,38	7.816.214,05	9.576.666,52	9.470.783,59
3	Kab. Solok	6.445.677,42	8.081.787,06	9.911.024,96	9.794.236,02
4	Kab. Sijunjung	4.386.266,00	5.537.779,00	6.757.042,94	6.683.022,09
5	Kab. Tanah Datar	6.386.572,13	7.955.070,00	9.684.476,43	9.575.503,02
6	Kab. Padang Pariaman	8.754.039,48	11.085.450,68	13.334.921,66	11.939.475,18
7	Kab. Agam	9.454.747,20	11.911.294,50	14.608.900,00	14.407.140,00
8	Kab. Lima Puluh Kota	7.230.366,65	9.125.377,06	11.192.425,99	11.062.311,08
9	Kab. Pasaman	4.064.884,48	5.085.320,55	6.176.328,21	6.122.756,76
10	Kab. Solok Selatan	2.602.649,00	3.267.807,00	3.979.921,00	3.928.020,00
11	Kab. Dharmasraya	4.840.425,70	6.156.752,05	7.560.324,96	7.454.968,15
12	Kab. Pasaman Barat	7.379.220,93	9.357.816,77	11.411.833,24	11.259.452,26
13	Kota Padang	27.427.383,21	35.180.548,31	44.459.301,23	43.631.433,48
14	Kota Solok	1.807.348,10	2.306.443,37	2.876.462,69	2.835.750,80
15	Kota Sawahlunto	1.787.814,14	2.251.781,01	2.796.538,21	2.760.934,37
16	Kota Padang Panjang	1.632.846,93	2.066.248,20	2.580.605,64	2.543.404,42
17	Kota Bukittinggi	3.819.053,61	4.874.254,56	6.152.082,50	6.045.093,28
18	Kota Payakumbuh	2.764.522,60	3.551.228,98	4.488.204,49	4.413.625,08
19	Kota Pariaman	2.297.958,94	2.900.328,18	3.592.023,08	3.544.660,44
	Sumatera Barat	111.323.147,53	140.995.072,94	174.142.409,55	170.428.587,65

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Berasarkan data PDRB ADHK kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2020 dapat dilihat bahwa pendapatan paling tinggi di setiap tahun berada di Kota Padang, dan pendapatan paling rendah berada di Kota Padang Panjang.

3.3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengetahui peningkatan ekonomi dalam suatu periode tahun. Laju pertumbuhan ekonomi menggunakan data PDRB Harga Koston, dengan hasil sebagai berikut.

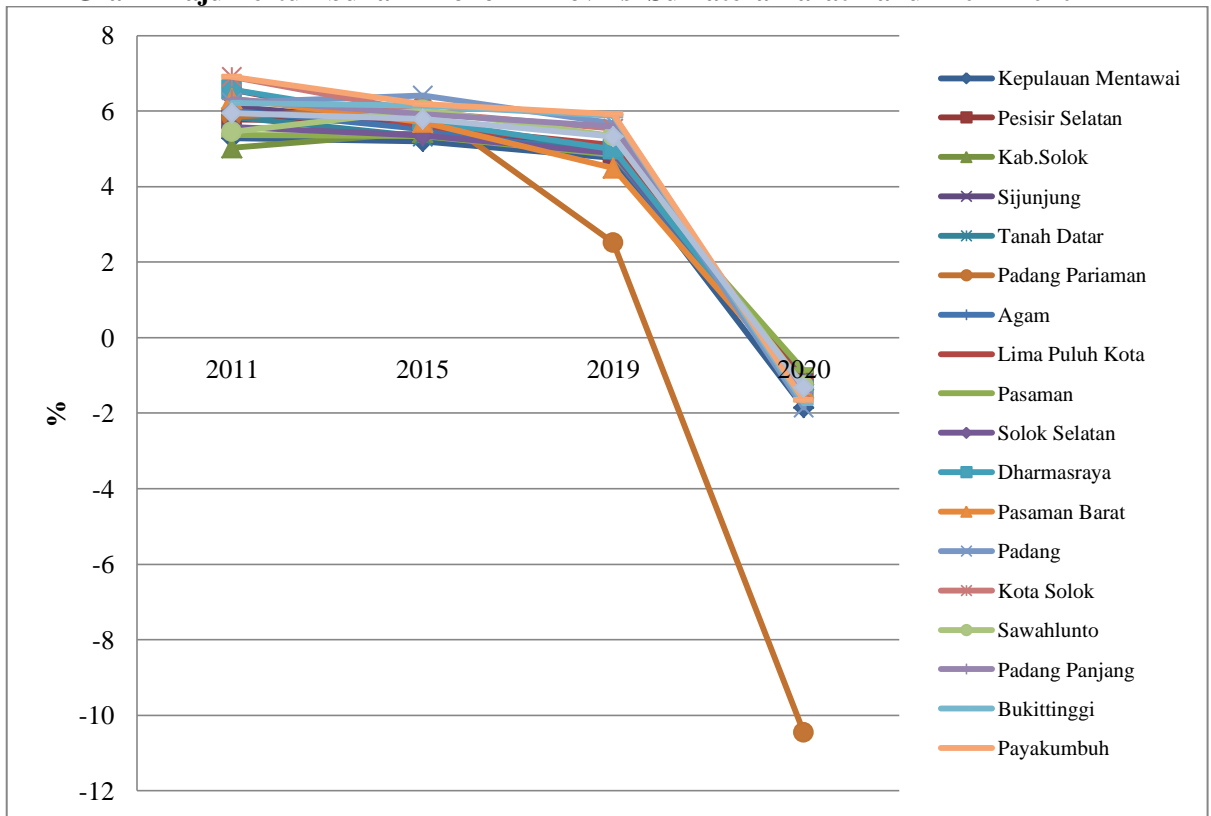
Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011-2020

No	Wilayah	Tahun			
		2011	2015	2019	2020
1	Kab. Kep. Mentawai	5.28	5.20	4.76	-1.85
2	Kab. Pesisir Selatan	5.78	5.73	4.81	-1.11
3	Kab. Solok	5.02	5.44	5.07	-1.12
4	Kab. Sijunjung	6.11	5.69	4.83	-1.10
5	Kab. Tanah Datar	5.84	5.33	5.01	-1.13
6	Kab. Padang Pariaman	5.85	6.14	2.51	-10.46
7	Kab. Agam	6.01	5.52	4.81	-1.38
8	Kab. Lima Puluh Kota	6.56	5.61	5.10	-1.16
9	Kab. Pasaman	5.36	5.34	4.84	-0.87
10	Kab. Solok Selatan	5.58	5.35	4.89	-1.24
11	Kab. Dharmasraya	6.56	5.75	4.98	-1.39
12	Kab. Pasaman Barat	6.33	5.70	4.49	-1.34
13	Kota Padang	6.23	6.41	5.68	-1.86
14	Kota Solok	6.9	5.97	5.53	-1.42
15	Kota Sawahlunto	5.45	6.03	5.34	-1.27
16	Kota Padang Panjang	6.31	5.91	5.59	-1.44
17	Kota Bukittinggi	6.21	6.14	5.88	-1.74
18	Kota Payakumbuh	6.91	6.19	5.92	-1.66
19	Kota Pariaman	5.94	5.79	5.33	-1.32
	Sumatera Barat	6.34	5.53	5.05	-1.60

Sumber : BPS Sumatera Barat 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi dengan kecenderungan menurun, dan mengalami penurunan yang sangat signifikan tahun 2019-2020. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Grafik Laju Pertumbuhan PDRB di Provinsi Sumatera Barat dibawah ini.

Gambar 3.3
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2020



Sumber : BPS Sumatera Barat 2021

3.3.3 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk di suatu wilayah dengan cara pendapatan regional yang dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Pendapatan perkapita merupakan indikator dalam pengukuran perkembangan perekonomian di suatu wilayah. Berikut merupakan data pendapatan perkapita Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2020.

Tabel 3.6
PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2020

No	Wilayah	Tahun			
		2011	2015	2019	2020
1	Kab. Kep. Mentawai	25.65	29.11	32.73	31.59
2	Kab. Pesisir Selatan	14.34	17.36	20.64	20.28
3	Kab. Solok	18.27	22.22	26.53	26.07
4	Kab. Sijunjung	21.23	24.88	28.47	27.74
5	Kab. Tanah Datar	18.73	23.06	27.81	27.45
6	Kab. Padang Pariaman	22.14	27.30	32.08	28.58
7	Kab. Agam	20.52	24.97	29.74	29.13
8	Kab. Lima Puluh Kota	20.43	24.72	29.24	28.66
9	Kab. Pasaman	15.79	18.84	21.96	21.57
10	Kab. Solok Selatan	17.60	20.45	23.25	22.60

No	Wilayah	Tahun			
		2011	2015	2019	2020
11	Kab. Dharmasraya	24.41	27.61	30.54	29.41
12	Kab. Pasaman Barat	19.66	22.81	25.72	24.93
13	Kota Padang	32.26	39.00	46.76	45.35
14	Kota Solok	29.68	34.90	40.51	39.33
15	Kota Sawahlunto	30.99	37.38	44.73	43.81
16	Kota Padang Panjang	34.03	40.60	48.06	46.74
17	Kota Bukittinggi	33.53	39.74	47.04	45.55
18	Kota Payakumbuh	23.16	27.78	33.11	32.10
19	Kota Pariaman	28.57	34.24	40.59	39.65
	Sumatera Barat	22.64	27.04	31.65	30.82

Sumber : BPS Sumatera Barat 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat pendapatan kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2019 meningkat, sedangkan pendapatan perkapita di tahun 2020 menurun di seluruh wilayah. Wilayah dengan pendapatan perkapita tertinggi di setiap tahun adalah Padang Panjang dan terendah berada di Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV

ANALISIS KETIMPANGAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

4.1 IDENTIFIKASI KONDISI EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA

Identifikasi kondisi ekonomi digunakan untuk mengetahui kontribusi sektor terbesar di kabupaten kota dan klasifikasi wilayah kabupaten kota. Identifikasi kondisi ekonomi dilakukan dengan menghitung kontribusi sektor terbesar dan tipologi kelas.

4.1.1 Kontribusi Sektor

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sektor yang berperan paling besar dalam perekonomian kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Analisis ini diawali dengan menghitung kontribusi 17 lapangan usaha penyusun PDRB kabupaten dan kota yang dihitung dengan rumus :

$$\text{Kontribusi Sektor} = \frac{\text{PDRB Sektoral}}{\text{PDRB Wilayah}} \times 100$$

Sumber : Teknik Analisis Regional Tahun 2015, Lutfi Muta'ali

Salah satu contoh penggunaan rumus diatas adalah untuk mencari kontribusi lapangan usaha A yaitu pertanian kehutanan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2011 sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan} &= \frac{1.032.172,84}{2.006.548,63} \times 100 \\ &= 51,44 \end{aligned}$$

Setelah diperoleh kontribusi dari 17 sektor lapangan usaha pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat pada lampiran 3-6 selanjutnya adalah mengelompokkan lapangan usaha tersebut menjadi 3 kelompok sektor utama yaitu sektor Primer, Sekunder dan Tersier dengan rincian pada tabel dibawah.

Tabel 4.1
Rincian Pembagian Jenis Sektor

No	Sektor	Lapangan Usaha
1	Primer	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
		B. Pertambangan dan Penggalian
2	Sekunder	C. Industri Pengolahan
		D. Pengadaan Listrik dan Gas
		E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
		F. Konstruksi
3	Tersier	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		H. Transportasi dan Pergudangan
		I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		J. Informasi dan Komunikasi
		K. Jasa Keuangan dan Asuransi
		L. Real Estate
		M,N Jasa Perusahaan
		O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
		P. Jasa Pendidikan
		Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R,S,T,U Jasa Lainnya		

Sumber : Hasil Analisis Studi Literatur, Tahun 2021

Berdasarkan rincian pembagian sektor ekonomi diatas maka diperoleh kontribusi sektor di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2020. Dari nilai kontribusi sektor yang diperoleh tersebut yang ditetapkan sebagai sektor utama adalah sektor dengan nilai kontribusi paling tinggi diantara ketiga kelompok sektor dalam setiap tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor tersebut memberikan peran paling besar dibandingkan dua sektor lainnya. Berikut merupakan hasil dari kontribusi ketiga sektor di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Baat tahun 2011-2020 .

Tabel 4.2
Kontribusi Sektor di Kabupaten dan Kota Tahun 2011-2020

No	Wilayah	Tahun 2011			Tahun 2015			Tahun 2019			Tahun 2020		
		P	S	T	P	S	T	P	S	T	P	S	T
1	Kab. Kep.Mentawai	53,22	13,72	33,06	50,78	15,31	33,91	47,42	16,41	36,17	49,79	16,29	33,92
2	Kab. Pesisir Selatan	45,27	17,66	37,07	43,67	18,35	37,98	40,20	18,40	41,40	40,49	17,74	41,77
3	Kab. Solok	47,43	12,91	39,65	44,42	13,99	41,59	41,10	14,33	44,57	41,72	14,02	44,27
4	Kab. Sijunjung	47,86	14,54	37,60	46,14	15,46	38,40	42,21	16,48	41,31	42,53	16,04	41,43
5	Kab. Tanah Datar	38,23	21,63	40,14	35,25	21,74	43,01	32,13	21,52	46,36	32,69	21,02	46,29
6	Kab. Padang Pariaman	29,10	21,20	49,70	27,72	21,57	50,71	26,90	21,17	51,93	29,99	22,96	47,05
7	Kab. Agam	37,69	20,05	42,26	35,67	20,06	44,28	33,03	19,38	47,59	33,68	18,77	47,55
8	Kab. Lima Puluh Kota	46,83	12,74	40,43	43,99	12,90	43,12	40,05	12,45	47,49	40,43	12,17	47,40
9	Kab. Pasaman	55,22	9,29	35,49	53,21	9,37	37,42	50,03	9,39	40,58	50,42	8,93	40,64
10	Kab. Solok Selatan	43,45	16,67	39,89	41,17	17,58	41,25	37,40	17,58	45,02	37,77	16,90	45,33
11	Kab. Dharmasraya	43,23	17,61	39,15	40,27	18,48	41,25	35,94	19,29	44,77	36,28	18,63	45,08
12	Kab. Pasaman Barat	48,54	21,60	29,86	46,43	22,22	31,35	44,39	20,87	34,75	44,39	20,53	35,07
13	Kota Padang	8,02	25,96	66,03	7,77	25,73	66,51	7,59	23,22	69,19	7,77	22,96	69,27
14	Kota Solok	7,52	18,38	74,10	6,64	18,46	74,90	5,74	17,71	76,55	5,88	17,49	76,63
15	Kota Sawahlunto	20,30	23,50	56,20	17,23	24,80	57,97	14,54	24,44	61,02	14,89	23,22	61,89
16	Kota Padang Panjang	6,41	20,17	73,42	5,66	20,59	73,75	4,98	19,13	75,90	5,10	18,86	76,03
17	Kota Bukittinggi	1,69	15,50	82,81	1,37	14,87	83,75	1,13	13,45	85,42	1,16	13,39	85,45
18	Kota Payakumbuh	8,38	18,62	73,00	7,66	18,88	73,46	6,52	19,05	74,43	6,71	18,38	74,91
19	Kota Pariaman	22,86	21,67	55,48	20,92	22,54	56,55	19,05	22,98	58,46	18,83	22,69	58,49

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Keterangan :

P = Sektor Primer

S = Sektor Sekunder

T = Sektor Tersier

Berdasarkan tabel kontribusi sektor diatas diketahui bahwa kontribusi sektor terbesar di seluruh kota pada setiap tahun tetap berasal dari sektor Tersier. Sedangkan untuk kabupaten, terdapat kabupaten dengan kontribusi sektor terbesar berasal dari sektor yang sama di setiap tahun dan ada pula yang mengalami perubahan sektor. Seperti pada Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan kontribusi sektor terbesar yang tetap berasal dari sektor Primer di setiap tahun, kemudian Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam yang berasal dari sektor Tersier di setiap tahun. Sedangkan untuk kabupaten yang mengalami perubahan kontribusi sektor Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasra yang pada awalnya memiliki kontribusi sektor terbesar yang berasal dari sektor Primer dan berubah menjadi sektor Tersier.

Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa wilayah kabupaten yang masih mengandalkan sektor primer merupakan wilayah yang masih berada di tahap awal perekonomian karena masih termasuk dalam pertanian yang tradisional. Sedangkan untuk wilayah kabupaten yang mengalami perubahan dari sektor primer ke sektor non primer dalam hal ini sektor tersier menunjukkan adanya upaya dalam memajukan kondisi perekonomian di wilayah tersebut karena sudah menuju perekonomian yang modern tidak bergantung pada sektor primer. Sedangkan wilayah dengan sektor utama non primer dalam hal ini tersier menunjukkan perekonomian sudah lebih maju dibandingkan wilayah lain.

Sejalan dengan hal tersebut pendapat beberapa ahli juga mengatakan bahwa majunya perekonomian ditandai dengan peningkatan pendapatan perkapita. Apabila semakin tinggi pendapatan masyarakat maka semakin rendah pula proporsi yang digunakan untuk membeli barang-barang pertanian, sebaliknya proporsi akan lebih besar untuk memenuhi barang-barang non pertanian.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat wilayah dengan sektor tersier perekonomiannya sudah lebih modern atau maju, wilayah yang mengalami perubahan dari sektor Primer menjadi sektor Tersier adalah wilayah yang masih bertransformasi dari perekonomian tradisional menuju ekonomi modern, dan wilayah dengan sektor utama primer masih perekonomian tradisional.

4.1.2 Klasifikasi Wilayah

Analisis ini dilakukan untuk melihat klasifikasi wilayah yang menggunakan Tipologi Klassen dilihat dari data pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita di kabupaten dan kota yang dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.3
Perubahan Klasifikasi Wilayah di Kabupaten dan Kota Tahun 2011

Laju Pertumbuhan Ekonomi (r)	PDRB Perkapita (Y)	
	Yi > Y	Yi < Y
ri > r	Kabupaten Dharmasraya Kota Solok Kota Payakumbuh	Kabupaten Lima Puluh Kota
ri < r	Kabupaten Kepulauan Mantawai Kota Padang Kota Sawahlunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Pariaman	Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Pasaman Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Pasaman Barat

Sumber : Studi Literatur Tahun 2021

Keterangan :

- ri = Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
- r = Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat
- Yi = PDRB Perkapita Kabupaten/Kota
- Y = PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil analisis klassen diatas, berikut merupakan uraian klasifikasi wilayah kabupaten dan kota pada tahun 2011.

a. Kuadran I (Wilayah Maju dan Cepat Tumbuh)

Wilayah Kuadran I adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih besar dibandingkan Provinsi Sumatera Barat, sehingga wilayah kuadran I dikatakan lebih maju dibandingkan wilayah lain. Wilayah yang termasuk dalam kuadran I adalah Kabupaten Dharmasraya, Kota Solok dan Kota Payakumbuh.

b. Kuadran II (Wilayah Maju tapi Tertekan)

Wilayah kuadran II adalah wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil tetapi pendapatan perkapita yang lebih besar jika dibandingkan dengan

provinsi. Hal tersebut menunjukkan wilayah ini sudah maju namun masih tertekan dari pertumbuhan ekonominya sehingga perlu ditingkatkan potensi ekonomi di wilayah ini agar pertumbuhan bisa semakin meningkat. Wilayah yang termasuk kuadran II adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Kota Pariaman.

c. Kuadran III (Wilayah Berkembang Cepat)

Wilayah kuadran III memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih besar namun pendapatan perkapita yang lebih kecil dibandingkan provinsi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diiringi dengan pendapatan perkapita yang tinggi menyebabkan wilayah ini hanya berkembang saja, belum termasuk wilayah maju. Wilayah kuadran III adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.

d. Wilayah IV (Wilayah Relatif Tertinggal)

Wilayah kuadran IV adalah wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya kecil dibandingkan provinsi, belum mampu bersaing dengan wilayah lain karena pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih kecil dari wilayah lainnya, sehingga dikatakan belum maju dan relatif tertinggal. Wilayah yang termasuk dalam kuadran IV adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat.

Berikut merupakan hasil analisis tipologi klassen kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015.

Tabel 4.4
Tipologi Klassen Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi (r)	PDRB Perkapita (Y)	
	$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
$r_i > r$	Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Dharmasraya Kota Padang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman	Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Sijunjung Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Pasaman Barat

Laju Pertumbuhan Ekonomi (r)	PDRB Perkapita (Y)	
	Yi > Y	Yi < Y
ri < r	Kabupaten Kepulauan Mantawai	Kabupaten Solok Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Pasaman

Sumber : Studi Literatur Tahun 2021

Keterangan :

- ri = Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
r = Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat
Yi = PDRB Perkapita Kabupaten/Kota
Y = PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel analisis klassen diatas, berikut merupakan uraian klasifikasi wilayah kabupaten dan kota pada tahun 2015

a. Kuadran I (Wilayah Maju dan Cepat Tumbuh)

Wilayah Kuadran I adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih besar dibandingkan Provinsi Sumatera Barat, sehingga wilayah kuadran I dikatakan lebih maju dibandingkan wilayah lain. Wilayah yang termasuk dalam kuadran I adalah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman.

b. Kuadran II (Wilayah Maju tapi Tertekan)

Wilayah kuadran II adalah wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil tetapi pendapatan perkapita yang lebih besar jika dibandingkan dengan provinsi. Hal tersebut menunjukkan wilayah ini sudah maju namun masih tertekan dari pertumbuhan ekonominya sehingga perlu ditingkatkan potensi ekonomi di wilayah ini agar pertumbuhan bisa semakin meningkat. Wilayah yang termasuk kuadran II adalah Kabupaten Kepulauan Mantawai.

c. Kuadran III (Wilayah Berkembang Cepat)

Wilayah kuadran III memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih besar namun pendapatan perkapita yang lebih kecil dibandingkan provinsi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diiringi dengan pendapatan perkapita yang

tinggi menyebabkan wilayah ini hanya berkembang saja, belum termasuk wilayah maju. Wilayah kuadran III adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat.

d. Wilayah IV (Wilayah Relatif Tertinggal)

Wilayah kuadran IV adalah wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya kecil dibandingkan provinsi, belum mampu bersaing dengan wilayah lain karena pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih kecil dari wilayah lainnya, sehingga dikatakan belum maju dan relatif tertinggal. Wilayah yang termasuk dalam kuadran IV adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pasaman.

Berikut merupakan hasil analisis tipologi klassen kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019.

Tabel 4.5
Tipologi Klassen Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Laju Pertumbuhan Ekonomi (r)	PDRB Perkapita (Y)	
	Yi > Y	Yi < Y
ri > r	Kota Padang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Pariaman Kota Payakumbuh	Kabupaten Solok Kabupaten Lima Puluh Kota
ri < r	Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Agam Kabupaten Pasaman Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Pasaman Barat

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2021

Keterangan :

- ri = Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
- r = Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat
- Yi = PDRB Perkapita Kabupaten/Kota
- Y = PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel analisis klassen diatas, berikut meurpakan uraian klasifikasi wilayah kabupaten dan kota pada tahun 2019.

a. Kuadran I (Wilayah Maju dan Cepat Tumbuh)

Wilayah Kuadran I adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih besar dibandingkan Provinsi Sumatera Barat, sehingga wilayah kuadran I dikatakan lebih maju dibandingkan wilayah lain. Wilayah yang termasuk dalam kuadran I adalah Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman.

b. Kuadran II (Wilayah Maju tapi Tertekan)

Wilayah kuadran II adalah wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil tetapi pendapatan perkapita yang lebih besar jika dibandingkan dengan provinsi. Hal tersebut menunjukkan wilayah ini sudah maju namun masih tertekan dari pertumbuhannya sehingga perlu ditingkatkan potensi ekonomi di wilayah ini agar pertumbuhan bisa semakin meningkat. Wilayah yang termasuk kuadran II adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Padang Pariaman.

c. Kuadran III (Wilayah Berkembang Cepat)

Wilayah kuadran III memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih besar namun pendapatan perkapita yang lebih kecil dibandingkan provinsi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diiringi dengan pendapatan perkapita yang tinggi menyebabkan wilayah ini hanya berkembang saja, belum termasuk wilayah maju. Wilayah kuadran III adalah Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Lima Puluh Kota

d. Wilayah IV (Wilayah Relatif Tertinggal)

Wilayah kuadran IV adalah wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya kecil dibandingkan provinsi, belum mampu bersaing dengan wilayah lain karena pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih kecil dari wilayah lainnya, sehingga dikatakan belum maju dan relatif tertinggal.

Wilayah yang termasuk dalam kuadran IV adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten DHarasraya, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Berikut merupakan hasil analisis tipologi klassen kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020.

Tabel 4.6
Tipologi Klassen Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Laju Pertumbuhan Ekonomi (r)	PDRB Perkapita (Y)	
	Yi > Y	Yi < Y
ri > r	Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Panjang Kota Pariaman	Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Pasaman Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Pasaman Barat
ri < r	Kabupaten Kepulauan Mentawai Kota Padang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh	Kabupaten Padang Pariaman

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2021

Keterangan :

- ri = Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
- r = Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat
- Yi = PDRB Perkapita Kabupaten/Kota
- Y = PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel analisis klassen diatas, berikut merupakan uraian klasifikasi wilayah kabupaten dan kota pada tahun 2019

- a. Kuadran I (Wilayah Maju dan Cepat Tumbuh)

Wilayah Kuadran I adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih besar dibandingkan Provinsi Sumatera Barat, sehingga wilayah kuadran I dikatakan lebih maju dibandingkan wilayah lain.

Wilayah yang termasuk dalam kuadran I adalah Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang dan Kota Pariaman.

b. Kuadran II (Wilayah Maju tapi Tertekan)

Wilayah kuadran II adalah wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil tetapi pendapatan perkapita yang lebih besar jika dibandingkan dengan provinsi. Hal tersebut menunjukkan wilayah ini sudah maju namun masih tertekan dari pertumbuhannya sehingga perlu ditingkatkan potensi ekonomi di wilayah ini agar pertumbuhan bisa semakin meningkat. Wilayah yang termasuk kuadran II adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh.

c. Kuadran III (Wilayah Berkembang Cepat)

Wilayah kuadran III memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih besar namun pendapatan perkapita yang lebih kecil dibandingkan provinsi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diiringi dengan pendapatan perkapita yang tinggi menyebabkan wilayah ini hanya berkembang saja, belum termasuk wilayah maju. Wilayah kuadran III adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat.

d. Wilayah IV (Wilayah Relatif Tertinggal)

Wilayah kuadran IV adalah wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya kecil dibandingkan provinsi, belum mampu bersaing dengan wilayah lain karena pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih kecil dari wilayah lainnya, sehingga dikatakan belum maju dan relatif tertinggal. Wilayah yang termasuk dalam kuadran IV adalah , Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan hasil tipologi klasifikasi kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat yang telah diperoleh pada tahun 2011-2020 terlihat bahwa sebagian besar kabupaten dan kota menempati klasifikasi wilayah yang berbeda-beda pada setiap tahun, perubahannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.7
Perubahan Klasifikasi Wilayah Kabupaten dan Kota Tahun 2011-2020

No	Wilayah	Klasifikasi Wilayah (Kuadran)			
		2011	2015	2019	2020
1	Kab. Kep.Mentawai	II	II	II	II
2	Kab. Pesisir Selatan	IV	III	IV	III
3	Kab. Solok	IV	IV	III	III
4	Kab. Sijunjung	IV	III	IV	III
5	Kab. Tanah Datar	IV	IV	IV	III
6	Kab. Padang Pariaman	IV	I	II	IV
7	Kab. Agam	IV	III	IV	III
8	Kab. Lima Puluh Kota	III	III	III	III
9	Kab. Pasaman	IV	III	IV	III
10	Kab. Solok Selatan	IV	III	IV	III
11	Kab. Dharmasraya	IV	III	IV	III
12	Kab. Pasaman Barat	IV	III	IV	III
13	Kota Padang	II	I	I	II
14	Kota Solok	I	I	I	I
15	Kota Sawahlunto	II	I	I	I
16	Kota Padang Panjang	II	I	I	I
17	Kota Bukittinggi	II	I	I	II
18	Kota Payakumbuh	I	I	I	II
19	Kota Pariaman	II	I	I	I

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2011 sebagian besar kabupaten menempati kuadran IV atau wilayah relatif tertinggal, terkecuali, Kabupaten Lima Puluh Kota yang tergolong kuadran III wilayah berkembang cepat, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tergolong kuadran II wilayah maju tapi tertekan dan Kabupaten Dharmasraya yang tergolong kuadran I wilayah maju dan cepat tumbuh. Sementara untuk kota yang sudah tergolong dalam kuadran I atau wilayah maju dan cepat tumbuh hanya Kota Solok dan Kota Padang, yang lainnya masih tergolong kuadran IV atau wilayah relatif tertekan.

Pada tahun 2015 kabupaten yang tergolong kuadran IV atau wilayah relatif tertinggal adalah Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, sebagian besar kabupaten mengalami peningkatan klasifikasi wilayah sehingga menempati kuadran III atau wilayah berkembang cepat, Kabupaten Kepulauan Mentawai tetap menempati kuadran II atau wilayah maju tapi tertekan, Kabupaten Padang Pariaman dan seluruh kota meningkat menjadi wilayah kuadran I atau wilayah maju dan cepat tumbuh.

Pada tahun 2019 penurunan terjadi di beberapa wilayah sehingga menempati kuadran IV terkecuali Kabupaten Solok yang meningkat menjadi kuadran III atau wilayah cepat berkembang cepat dan Kabupaten Lima Puluh Kota masih berada di kuadran III wilayah berkembang cepat, dan seluruh kota termasuk kuadran I yaitu wilayah maju dan cepat tumbuh.

Sementara pada tahun 2011 Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan sehingga berubah menjadi kuadran IV atau wilayah relatif tertinggal, sebagian besar kabupaten meningkat menjadi kuadran III atau wilayah berkembang cepat, Kabupaten Kepulauan Mentawai tetap berada di kuadran II atau wilayah maju tapi tertekan, beberapa kota mengalami penurunan sehingga menempati kuadran II atau wilayah maju tapi tertekan yaitu Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh, sedangkan untuk kota lainnya masih tetap menempati kuadran I atau wilayah maju dan cepat tumbuh.

Berdasarkan perubahan klasifikasi wilayah pada tahun 2011-2020 maka dapat disimpulkan bahwa Kota Solok adalah wilayah maju dan cepat tumbuh, sementara untuk enam kota lainnya tergolong wilayah maju tapi tertekan yang bergerak menuju wilayah maju. Kemudian untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai tergolong wilayah maju tapi tertekan, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah wilayah berkembang cepat. Sementara untuk wilayah lainnya yang mengalami perubahan di setiap tahun, seperti wilayah relatif tertinggal yang bergerak menuju wilayah berkembang yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Agam, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat. Sementara untuk Kabupaten Padang Pariaman tergolong dalam wilayah tertinggal karena perubahan menunjukkan penurunan.

Berdasarkan kondisi ekonomi yang telah diidentifikasi, maka berikut keterkaitan antara klasifikasi wilayah dan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian kabupaten dan kota.

Tabel 4.8
Perubahan Klasifikasi Wilayah dan Sektor Utama di Kabupaten Kota Tahun 2011-2020

No	Wilayah	2011		2015		2019		2020	
		Klasifikasi Wilayah (Kuadran)	Sektor Utama	Klasifikasi Wilayah (Kuadran)	Sektor Utama	Klasifikasi Wilayah (Kuadran)	Sektor Utama	Klasifikasi Wilayah (Kuadran)	Sektor Utama
1	Kab. Kep.Mentawai	II	P	II	P	2019	P	II	P
2	Kab. Pesisir Selatan	IV	P	III	P	II	P	III	P
3	Kab. Solok	IV	P	IV	P	IV	P	III	P
4	Kab. Sijunjung	IV	P	III	P	III	P	III	P
5	Kab. Tanah Datar	IV	T	IV	T	IV	T	III	T
6	Kab. Padang Pariaman	IV	T	I	T	IV	T	IV	T
7	Kab. Agam	IV	T	III	T	II	T	III	T
8	Kab. Lima Puluh Kota	III	P	III	P	IV	T	III	T
9	Kab. Pasaman	IV	P	III	P	III	P	III	P
10	Kab. Solok Selatan	IV	P	III	T	IV	T	III	T
11	Kab. Dharmasraya	IV	P	III	T	IV	T	III	T

No	Wilayah	2011		2015		2019		2020	
		Klasifikasi Wilayah (Kuadran)	Sektor Utama	Klasifikasi Wilayah (Kuadran)	Sektor Utama	Klasifikasi Wilayah (Kuadran)	Sektor Utama	Klasifikasi Wilayah (Kuadran)	Sektor Utama
12	Kab. Pasaman Barat	IV	P	III	P	IV	P	III	P
13	Kota Padang	II	T	I	T	IV	T	II	T
14	Kota Solok	I	T	I	T	I	T	I	T
15	Kota Sawahlunto	II	T	I	T	I	T	I	T
16	Kota Padang Panjang	II	T	I	T	I	T	I	T
17	Kota Bukittinggi	II	T	I	T	I	T	II	T
18	Kota Payakumbuh	I	T	I	T	I	T	II	T
19	Kota Pariaman	II	T	I	T	I	T	I	T

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Keterangan :

P = Sektor Primer

S = Sektor Sekunder

T = Sektor Tersier

I = Kuadran I (Wilayah Maju dan Cepat Tumbuh)

II = Kuadran II (Wilayah Maju Tapi Tertekan)

III = Kuadran III (Wilayah Berkembang Cepat)

IV = Kuadran IV (Wilayah Relatif Tertinggal)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada wilayah maju dan wilayah tertekan (seluruh kota) yang bergerak menuju wilayah maju memiliki sektor utama tersier, wilayah maju tapi tertekan yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki sektor utama primer, untuk wilayah berkembang cepat yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami perubahan sektor utama pada pertengahan periode pengamatan yaitu sektor primer berubah menjadi sektor tersier. Sedangkan untuk wilayah dengan perubahan di seputar wilayah berkembang cepat dan wilayah memiliki kondisi yang berbeda. Terdapat wilayah dengan sektor utama primer, wilayah dengan sektor utama tersier, dan wilayah dengan sektor utama yang berubah dari sektor primer ke sektor tersier.

4.2 ANALISIS KETIMPANGAN EKONOMI WILAYAH

Analisis ketimpangan wilayah dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat dan melihat ketimpangan pada kabupaten dan kota. Ketimpangan pada tingkat provinsi diperoleh dari rumus Indeks Williamson sebagai berikut.

$$\text{Indeks Williamson} = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i/n}}{Y}$$

Keterangan :

Y_i = PDRB Perkapita Kabupaten/Kota

Y = PDRB Perkapita Provinsi

f_i = Jumlah penduduk Kabupaten/Kota

n = Jumlah penduduk Provinsi

Indeks Williamson memiliki tingkatan berdasarkan nilai yang didapat dari hasil perhitungannya. Berikut merupakan kriteria ketimpangan yang ditentukan berdasarkan nilai Indeks Williamsom.

Tabel 4.9
Kriteria Ketimpangan Indeks Williamson

Nilai Indeks Williamson	Kriteria
0,1 – 0,35	Ketimpangan rendah
0,35 – 0,50	Ketimpangan sedang
>0,5	Ketimpangan tinggi

Sumber : Teknik Analisis Regional, Lutfi Muta'ali 2015

Berdasarkan ketentuan rumus dan kategori nilai Indeks Williamson diatas, maka berikut adalah nilai Indeks Williamson yang diperoleh untuk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011-2020.

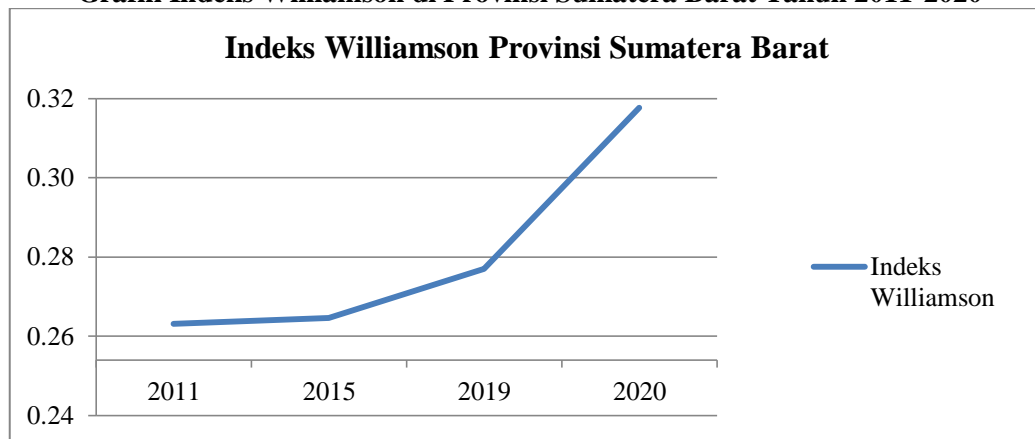
Tabel 4.10
Indeks Williamson Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2020

Tahun	Nilai Indeks Williamson	Kriteria
2011	0.26	Ketimpangan rendah
2015	0.26	Ketimpangan rendah
2019	0.28	Ketimpangan rendah
2020	0.32	Ketimpangan rendah

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Berdasarkan nilai ketimpangan yang telah diperoleh, diketahui angka ketimpangan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011-2020 meningkat dan termasuk dalam kriteria ketimpangan yang rendah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik perubahan Indeks Williamson di Provinsi Sumatera Barat dibawah ini.

Gambar 4.1
Grafik Indeks Williamson di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2020



Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Grafik diatas menunjukkan perubahan nilai Indeks Williamson di Provinsi Sumatera Barat meningkat pada tahun 2011-2019 dan adanya peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2020. Nilai Indeks Williamson yang diperoleh pada tahun 2011-2020 termasuk dalam ketimpangan yang rendah. Artinya ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011-2020 masih rendah namun cenderung meningkat.

Ketimpangan yang meningkat ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, dimana menurut beberapa penelitian terdahulu bahwa ketimpangan memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditemukan di Provinsi Sumatera Barat, dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011-2020 cenderung menurun sementara ketimpangan cenderung meningkat.

Terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap ketimpangan pada tahun 2020, hal ini jika dikaitkan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 hal ini sangat wajar karena adanya penurunan kondisi ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 tersebut. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang negatif dan menurunnya pendapatan perkapita di seluruh wilayah, sehingga berdampak terhadap peningkatan yang drastis pada ketimpangan. Hal ini terjadi akibat adanya wabah pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia yang juga dirasakan oleh Indonesia, Provinsi Sumatera Barat khususnya.

Setelah diketahui bahwa ketimpangan di Provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat, selanjutnya adalah untuk mengetahui ketimpangan antar kabupaten kotanya. Ketimpangan antar kabupaten dan kota dilihat berdasarkan indikator utama

ketimpangan yaitu pendapatan perkapita, dalam hal ini yang dilihat adalah selisih pendapatan perkapita kabupaten dan kota terhadap rata-rata di provinsi. Hal yang difokuskan dalam analisis ini adalah angka selisih yang dihasilkan apakah lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi sehingga menghasilkan angka selisih yang negatif. Semakin besar selisih tersebut berada di bawah rata-rata provinsi maka ketimpangan dianggap semakin membesar. Selisih pendapatan perkapita tersebut diperoleh dengan rumus :

$$\text{Selisih Pendapatan Perkapita} = Y_i - Y$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota

Y_i = Pendapatan Perkapita Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan perhitungan rumus diatas berikut hasil selisih pendapatan perkapita kabupaten kota terhadap Provinsi Sumatera Barat tahun 2011, 2015, 2019 dan 2020.

Tabel 4.11
Selisih Pendapatan Perkapita Kabupaten Kota Terhadap Provinsi Sumatera Barat

No	Wilayah	Y_i				$Y_i - Y$			
		2011	2015	2019	2020	2011	2015	2019	2020
1	Kab. Kep.Mentawai	25,65	29,11	32,73	31,59	3.01	2.07	1.08	0.77
2	Kab. Pesisir Selatan	14,34	17,36	20,64	20,28	-8.30	-9.68	-11.01	-10.54
3	Kab. Solok	18,27	22,22	26,53	26,07	-4.37	-4.82	-5.12	-4.75
4	Kab. Sijunjung	21,23	24,88	28,47	27,74	-1.41	-2.16	-3.18	-3.08
5	Kab. Tanah Datar	18,73	23,06	27,81	27,45	-3.91	-3.98	-3.84	-3.37
6	Kab. Padang Pariaman	22,14	27,30	32,08	28,58	-0.50	0.26	0.43	-2.24
7	Kab. Agam	20,52	24,97	29,74	29,13	-2.12	-2.07	-1.91	-1.69
8	Kab. Lima Puluh Kota	20,43	24,72	29,24	28,66	-2.21	-2.32	-2.41	-2.16
9	Kab. Pasaman	15,79	18,84	21,96	21,57	-6.85	-8.20	-9.69	-9.25
10	Kab. Solok Selatan	17,60	20,45	23,25	22,60	-5.04	-6.59	-8.40	-8.22
11	Kab. Dharmasraya	24,41	27,61	30,54	29,41	1.77	0.57	-1.11	-1.41
12	Kab. Pasaman Barat	19,66	22,81	25,72	24,93	-2.98	-4.23	-5.93	-5.89
13	Kota Padang	32,26	39,00	46,76	45,35	9.62	11.96	15.11	14.53
14	Kota Solok	29,68	34,90	40,51	39,33	7.04	7.86	8.86	8.51
15	Kota Sawahlunto	30,99	37,38	44,73	43,81	8.35	10.34	13.08	12.99
16	Kota Padang Panjang	34,03	40,60	48,06	46,74	11.39	13.56	16.41	15.92
17	Kota Bukittinggi	33,53	39,74	47,04	45,55	10.89	12.70	15.39	14.73
18	Kota Payakumbuh	23,16	27,78	33,11	32,10	0.52	0.74	1.46	1.28
19	Kota Pariaman	28,57	34,24	40,59	39,65	5.93	7.20	8.94	8.83
	Sumatera Barat (Y)	22,64	27,04	31,65	30,82	0	0	0	0

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

Keterangan :

Y = Pendapatan Perkapita Provinsi (juta rupiah)

Yi = Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota (juta rupiah)

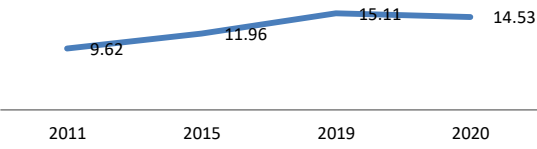
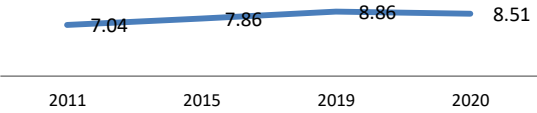
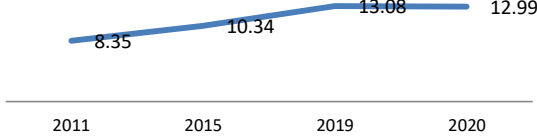
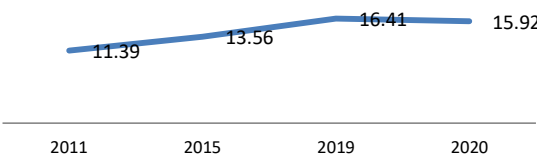
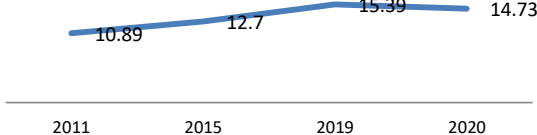
Setelah diperoleh selisih pendapatan perkapita di kabupaten kota terhadap provinsi, dapat dilihat bahwa setiap wilayah memiliki angka selisih yang berbeda-beda di setiap tahun. Angka selisih tersebut terdiri dari angka positif dan angka selisih negatif. Angka positif menunjukkan selisih pendapatan perkapita suatu wilayah berada di atas garis nol, menandakan bahwa pendapatan perkapita wilayah tersebut lebih besar dari pendapatan perkapita rata-rata provinsi. Sementara untuk angka selisih negatif menunjukkan selisih pendapatan perkapita suatu wilayah berada di bawah garis nol yang menandakan pendapatan perkapita wilayah tersebut lebih kecil atau dibawah pendapatan perkapita rata-rata provinsi.

Untuk memudahkan dalam menentukan ketimpangan di kabupaten dan kota maka akan dikelompokkan menjadi beberapa pola berdasarkan angka selisih yang dihasilkan pada setiap tahun, dengan rincian sebagai berikut.

1) Pola I

Pola I merupakan grafik yang menunjukkan angka selisih yang positif berada di atas garis nol, artinya pendapatan perkapita kabupaten atau kota lebih besar atau diatas pendapatan perkapita rata-rata provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut maka wilayah yang tergolong dalam Pola I ini tidak termasuk wilayah yang timpang, karena kondisi ekonomi dikatakan sudah maju dan lebih baik dibandingkan wilayah lain dilihat dari pendapatan perkapita yang lebih besar dari rata-rata provinsi. Dalam penelitian ini dari bentuk grafik pola I dibagi menjadi dua yaitu pola dengan selisih semakin membesar dan selisih semakin mengecil. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12
Pola I Grafik Selisih Pendapatan Perkapita Terhadap Provinsi

No	Wilayah	Bentuk Grafik										
1	Kota Padang	 <table border="1" data-bbox="740 353 1278 501"> <tr><th>Tahun</th><td>2011</td><td>2015</td><td>2019</td><td>2020</td></tr> <tr><th>Nilai</th><td>9.62</td><td>11.96</td><td>15.11</td><td>14.53</td></tr> </table>	Tahun	2011	2015	2019	2020	Nilai	9.62	11.96	15.11	14.53
Tahun	2011	2015	2019	2020								
Nilai	9.62	11.96	15.11	14.53								
2	Kota Solok	 <table border="1" data-bbox="740 685 1278 797"> <tr><th>Tahun</th><td>2011</td><td>2015</td><td>2019</td><td>2020</td></tr> <tr><th>Nilai</th><td>7.04</td><td>7.86</td><td>8.86</td><td>8.51</td></tr> </table>	Tahun	2011	2015	2019	2020	Nilai	7.04	7.86	8.86	8.51
Tahun	2011	2015	2019	2020								
Nilai	7.04	7.86	8.86	8.51								
3	Kota Sawahlunto	 <table border="1" data-bbox="740 976 1278 1111"> <tr><th>Tahun</th><td>2011</td><td>2015</td><td>2019</td><td>2020</td></tr> <tr><th>Nilai</th><td>8.35</td><td>10.34</td><td>13.08</td><td>12.99</td></tr> </table>	Tahun	2011	2015	2019	2020	Nilai	8.35	10.34	13.08	12.99
Tahun	2011	2015	2019	2020								
Nilai	8.35	10.34	13.08	12.99								
4	Kota Padang Panjang	 <table border="1" data-bbox="740 1290 1278 1447"> <tr><th>Tahun</th><td>2011</td><td>2015</td><td>2019</td><td>2020</td></tr> <tr><th>Nilai</th><td>11.39</td><td>13.56</td><td>16.41</td><td>15.92</td></tr> </table>	Tahun	2011	2015	2019	2020	Nilai	11.39	13.56	16.41	15.92
Tahun	2011	2015	2019	2020								
Nilai	11.39	13.56	16.41	15.92								
5	Kota Bukittinggi	 <table border="1" data-bbox="740 1626 1278 1760"> <tr><th>Tahun</th><td>2011</td><td>2015</td><td>2019</td><td>2020</td></tr> <tr><th>Nilai</th><td>10.89</td><td>12.7</td><td>15.39</td><td>14.73</td></tr> </table>	Tahun	2011	2015	2019	2020	Nilai	10.89	12.7	15.39	14.73
Tahun	2011	2015	2019	2020								
Nilai	10.89	12.7	15.39	14.73								

No	Wilayah	Bentuk Grafik
6	Kota Payakumbuh	
7	Kota Pariaman	
8	Kab. Kep.Mentawai	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

Keterangan :

- = Grafik Selisih Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi
- = Garis Rata-rata Provinsi

Dapat dilihat bahwa kota memiliki pendapatan perkapita yang lebih besar dari rata-rata provinsi, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi lebih besar dan kontribusi sektor utama yang besar pula. Pada tahun 2011 seluruh kota kecuali Kota Solok dan Kota Payakumbuh belum termasuk wilayah maju melainkan wilayah tertinggal karena pertumbuhan ekonomi masih lebih rendah dibandingkan provinsi dan pendapatan perkapita lebih besar dari provinsi. Namun kondisi ekonomi meningkat pada tahun 2011-2015 sehingga seluruh kota sudah termasuk wilayah maju. Pendapatan perkapita yang meningkat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat, hal ini juga berkaitan dengan kontribusi dari sektor terhadap pendapatan wilayah. Kontribusi terbesar di kota berasal dari sektor Tersier, dengan nilai kontribusi yang

semakin meningkat pada tahun 2011-2019. Dengan kondisi ekonomi yang terus meningkat tersebut maka wilayah kota semakin maju dilihat dari pendapatan perkapitanya yang semakin meningkat dibandingkan provinsi. Tingginya pendapatan perkapita di kota juga disebabkan oleh pertumbuhan penduduk lebih kecil dibandingkan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2011-2019, sehingga bertambahnya penduduk tidak menekan perekonomian.

Kemudian adanya perubahan yang drastis pada tahun 2020 memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang menurun diseluruh wilayah, termasuk di wilayah kota. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang, Bukittinggi dan Payakumbuh lebih rendah dibandingkan provinsi sehingga menurunkan klasifikasi wilayah dari wilayah maju (kuadran I) menjadi wilayah tertekan (kuadran III). Hal ini juga menyebabkan penurunan pendapatan perkapita namun masih lebih besar di bandingkan provinsi. Sedangkan sektor Tersier justru menunjukkan kontribusi yang meningkat.

Grafik selisih pada Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan selisih pendapatan perkapita terhadap provinsi yang cenderung mengecil, grafik berada diatas garis rata-rata. Hal ini karena pendapatan perkapita di Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih besar dari rata-rata provinsi, namun cenderung menurun mendekati rata-rata perkapita provinsi, sehingga selisih dari pendapatan perkapita yang dihasilkan mengecil. Wilayah ini sudah dianggap maju dari segi pendapatan perkapita, namun masih tertekan karena pertumbuhan ekonomi masih dibawah angka provinsi dan semakin menurun di setiap tahun. Berdasarkan beberapa teori yang menyatakan besarnya pendapatan perkapita dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk terjadi di wilayah ini pada tahun 2011-2019, yang menunjukkan tahun pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan pertumbuhan penduduk sehingga pendapatan perkapita yang dihasilkan juga lebih besar. Sementara untuk nilai pendapatan perkapita yang semakin menurun, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang juga menurun ini karena adanya penurunan pada kontribusi sektor utama (sektor Primer). Kontribusi sektor yang menurun menunjukkan peranan pendapatan sektor terhadap pendapatan wilayah juga menurun, sehingga berdampak pada pendapatan perkapita.

Sementara untuk tahun 2020 terjadi penurunan yang drastis pada pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi di angka negatif yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak tercapai pada tahun ini. Hal ini terjadi di seluruh wilayah, tidak hanya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, karena dampak dari wabah pandemi COVID-19 yang

menyerang pada awal tahun 2020. Meski terjadi penurunannya drastis tetapi pendapatan perkapita masih lebih besar dibandingkan pendapatan provinsi karena pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 masih tidak menekan pertumbuhan ekonomi. Terjadinya perubahan yang drastis pada tahun 2020 ini merupakan efek dari pandemi yang membatasi aktifitas ekonomi sehingga tidak bisa berlangsung seperti biasanya. Sementara itu dari sisi kontribusi sektor utama terlihat adanya peningkatan sektor primer pada tahun 2020. Sehingga dapat dikatakan meski kondisi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2011-2020 mengalami penurunan namun tidak menyebabkan ketimpangan yang membesar.

2) Pola II

Pola II merupakan grafik yang menunjukkan angka selisih yang negatif yaitu berada dibawah garis rata-rata, artinya pendapatan perkapita di kabupaten dan kota pada pola ini lebih kecil dibandingkan pendapatan perkapita Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut maka wilayah yang tergolong dalam pola II ini merupakan wilayah yang timpang, karena kondisi ekonomi dikatakan masih dibawah kabupaten dan kota lain dilihat dari pendapatan perkapita yang lebih kecil dari rata-rata provinsi pada setiap tahun. Grafik Pola II dibagi menjadi dua tipe yaitu grafik dengan selisih semakin membesar hingga 2020 dan grafik yang semakin membesar hingga 2019 agak mengecil di tahun 2020.

Tabel 4.13
Pola II Grafik Selisih Pendapatan Perkapita Kabupaten Kota Terhadap Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2020

No	Wilayah	Bentuk Grafik										
1	Kab. Pesisir Selatan	<table border="1"> <caption>Data for Grafik Selisih Pendapatan Perkapita Kabupaten Kota Terhadap Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2020</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Selisih</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>8.3</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>9.68</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>11.01</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>10.54</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Selisih	2011	8.3	2015	9.68	2019	11.01	2020	10.54
Tahun	Selisih											
2011	8.3											
2015	9.68											
2019	11.01											
2020	10.54											

No	Wilayah	Bentuk Grafik										
2	Kab. Solok	<p>A line graph showing the values for Kab. Solok across four years: 2011, 2015, 2019, and 2020. The values are -4.37, -4.82, -5.12, and -4.75 respectively. The line starts at -4.37 in 2011, dips to -4.82 in 2015, reaches its lowest point at -5.12 in 2019, and then rises to -4.75 in 2020.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>-4.37</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-4.82</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-5.12</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-4.75</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Nilai	2011	-4.37	2015	-4.82	2019	-5.12	2020	-4.75
Tahun	Nilai											
2011	-4.37											
2015	-4.82											
2019	-5.12											
2020	-4.75											
3	Kab. Sijunjung	<p>A line graph showing the values for Kab. Sijunjung across four years: 2011, 2015, 2019, and 2020. The values are -1.41, -2.16, -3.18, and -3.08 respectively. The line starts at -1.41 in 2011, decreases to -2.16 in 2015, reaches its lowest point at -3.18 in 2019, and then slightly increases to -3.08 in 2020.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>-1.41</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-2.16</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-3.18</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-3.08</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Nilai	2011	-1.41	2015	-2.16	2019	-3.18	2020	-3.08
Tahun	Nilai											
2011	-1.41											
2015	-2.16											
2019	-3.18											
2020	-3.08											
4	Kab. Tanah Datar	<p>A line graph showing the values for Kab. Tanah Datar across four years: 2011, 2015, 2019, and 2020. The values are -3.91, -3.98, -3.84, and -3.37 respectively. The line starts at -3.91 in 2011, dips slightly to -3.98 in 2015, rises to -3.84 in 2019, and then rises further to -3.37 in 2020.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>-3.91</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-3.98</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-3.84</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-3.37</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Nilai	2011	-3.91	2015	-3.98	2019	-3.84	2020	-3.37
Tahun	Nilai											
2011	-3.91											
2015	-3.98											
2019	-3.84											
2020	-3.37											
6	Kab. Agam	<p>A line graph showing the values for Kab. Agam across four years: 2011, 2015, 2019, and 2020. The values are -2.12, -2.07, -1.91, and -1.69 respectively. The line starts at -2.12 in 2011, rises slightly to -2.07 in 2015, continues to rise to -1.91 in 2019, and reaches its highest point at -1.69 in 2020.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>-2.12</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-2.07</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-1.91</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-1.69</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Nilai	2011	-2.12	2015	-2.07	2019	-1.91	2020	-1.69
Tahun	Nilai											
2011	-2.12											
2015	-2.07											
2019	-1.91											
2020	-1.69											
7	Kab. Lima Puluh Kota	<p>A line graph showing the values for Kab. Lima Puluh Kota across four years: 2011, 2015, 2019, and 2020. The values are -2.21, -2.32, -2.41, and -2.16 respectively. The line starts at -2.21 in 2011, dips to -2.32 in 2015, reaches its lowest point at -2.41 in 2019, and then rises to -2.16 in 2020.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>-2.21</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-2.32</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-2.41</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-2.16</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Nilai	2011	-2.21	2015	-2.32	2019	-2.41	2020	-2.16
Tahun	Nilai											
2011	-2.21											
2015	-2.32											
2019	-2.41											
2020	-2.16											

No	Wilayah	Bentuk Grafik
	Kab. Pasaman	
	Kab. Solok Selatan	
	Kab. Pasaman Barat	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

Keterangan :

- = Grafik Selisih Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi
- = Garis Rata-rata Provinsi

Wilayah yang tergabung dalam pola grafik ini adalah wilayah dengan selisih pendapatan perkapita yang berada di angka negatif dan semakin membesar tahun 2011-2019, namun sedikit mengecil di tahun 2020. Artinya pendapatan perkapita di wilayah ini lebih kecil dari rata-rata provinsi, semakin menurun tahun 2011-2019 sedikit meningkat di tahun 2020. Perkapita yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan wilayah tersebut masih belum sejahtera atau belum maju. Wilayah yang memiliki pola grafik ini adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat.

Pendapatan perkapita yang lebih rendah dari rata-rata provinsi pada tahun 2011-2019 karena pertumbuhan ekonomi semakin menurun. Kedua indikator tersebut jika dibandingkan angka di provinsi menyebabkan klasifikasi wilayah yang berbeda di setiap wilayah, dimana wilayah pada pola ini menempati klasifikasi yang berbeda-beda di setiap tahun dengan perubahan hanya seputar kuadran IV wilayah tertinggal dan kuadran II wilayah berkembang.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan wilayah seperti pada Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat, pertumbuhan ekonomi yang menurun ini dipicu oleh menurunnya kontribusi sektor primer pada tahun 2011-2019. Untuk Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam kontribusi terbesar berasal dari sektor Tersier, yang meningkat pada tahun 2011-2019. Sementara untuk Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami perubahan yaitu pada tahun 2011 dan 2015 kontribusi terbesar berasal dari sektor Primer, tahun 2019 berasal dari sektor Tersier. Pada tahun 2011-2015 kontribusi sektor Primer menurun sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan tahun 2019 pertumbuhan ekonomi menurun karena adanya perubahan menjadi sektor Tersier walaupun nilai kontribusi sektor ini lebih besar dibandingkan sektor primer di tahun sebelumnya. Berdasarkan penjelasan didapat pada tahun 2012-2019 di wilayah ini ketimpangan yang semakin membesar karena kontribusi sektor Primer semakin menurun, sementara kontribusi sektor tersier meningkat.

Sementara itu terkait adanya perubahan secara drastis yang terjadi di tahun 2020 dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang menurun, menyebabkan selisih pendapatan perkapita yang menandakan ketimpangan semakin mengecil. Dikaitkan dengan kontribusi sektor terbesar di wilayah, kontribusi sektor primer meningkat dan kontribusi sektor tersier menurun pada tahun 2020. Hal ini masih sejalan dengan hubungan kontribusi sektor di tahun 2011-2019 bahwa kontribusi sektor primer berlawanan arah dengan ketimpangan, sementara kontribusi sektor tersier searah dengan ketimpangan. Selain itu, menurunnya kondisi ekonomi di tahun 2020 ini tidak menyebabkan ketimpangan yang semakin membesar di wilayah Pola II, ditunjukkan dengan ketimpangan dari selisih pendapatan perkapita terhadap provinsi yang lebih besar terjadi bukan pada tahun 2020 melainkan pada tahun 2019.

3) Pola III

Pola III merupakan grafik yang menunjukkan selisih yang perubahan dengan menyentuh garis rata-rata dengan selisih berada dibawah garis rata-rata atau angka negatif pada akhir tahun pengamatan. Artinya pendapatan perkapita di wilayah ini jika dibandingkan dengan provinsi mengalami perubahan yang menurun. Wilayah yang termasuk pola ini adalah Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Dharmasraya. Berikut merupakan pola selisih pendapatan perkapita terhadap provinsi.

Tabel 4.14
Pola III Grafik Selisih Pendapatan Perkapita Kabupaten Kota Terhadap Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2020

No	Wilayah	Bentuk Grafik
1	Kab. Padang Pariaman	
2	Kab. Dharmasraya	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

Keterangan :

- = Grafik Selisih Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi
- = Garis Rata-rata Provinsi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pola grafik selisih di Kabupaten Padang Pariaman ini menunjukkan selisih pendapatan perkapita yang cenderung tetap pada tahun 2011-2019 kemudian membesar hingga ke angka negatif pada 2020. Selisih pendapatan perkapita di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011 berada di angka negatif, pada tahun 2015-2019 di angka positif dan tahun 2020 membesar ke angka negatif. Artinya, pendapatan perkapita membaik dari tahun 2011-2019, namun menurun

lagi pada tahun 2020. Meningkatnya pendapatan perkapita di Kabupaten Pariaman dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan kontribusi sektor, dimana kontribusi sektor terbesar berasal dari sektor tersier yang semakin meningkat pada tahun 2011-2019. Meningkatnya kontribusi sektor tersebut menandakan tingginya konsentrasi kegiatan ekonomi dari sektor tersier di Kabupaten Padang Pariaman sehingga menghasilkan pendapatan sektor yang besar dibandingkan sektor-sektor lain, dan berpengaruh terhadap pendapatan wilayah, begitu pula sebaliknya.

Kondisi ekonomi tersebut menyebabkan klasifikasi wilayah yang berubah dari tahun 2011-2019. Pada tahun 2011 Kabupaten Padang Pariaman berada di kuadran IV (wilayah tertinggal), tahun 2015 berada di kuadran I (wilayah maju) dan tahun 2019 menurun menjadi kuadran IV (wilayah tertinggal). Artinya kondisi ekonomi Kabupaten Padang Pariman mengalami penurunan.

Pada tahun 2020 kondisi ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan dilihat dari klasifikasi wilayah yang termasuk wilayah tertinggal karena pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi menurun sangat drastis. Hal ini menyebabkan ketimpangan semakin membesar yang ditunjukkan dari selisih pendapatan perkapita terhadap rata-rata provinsi di Kabupaten Padang Pariaman berada dibawah rata-rata. Dihubungkan dengan kontribusi sektor, bahwa ketimpangan yang membesar ini karena kontribusi sektor tersier yang menurun pada tahun 2020.

Sedangkan untuk Kabupaten Dharmasraya tahun 2011-2015 memiliki pendapatan perkapita yang lebih besar dibandingkan provinsi, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga lebih kecil dibandingkan provinsi. Sehingga selisih pendapatan perkapita terhadap provinsi yang pada awalnya berada di angka positif menurun menjadi angka negatif (dibawah garis nol). Dari sisi kontribusi sektor, Kabupaten Dharmasraya mengalami perubahan yaitu pada tahun 2011 kontribusi sektor terbesar berasal dari sektor primer dan di tahun 2015-2019 menjadi sektor tersier, dengan kontribusi sektor yang meningkat. Kondisi ini menandakan peningkatan kontribusi sektor tersier tidak sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang berdampak pada pendapatan perkapita.

Pada tahun 2011-2019 Kabupaten Dharmasraya menduduki klasifikasi wilayah yang berubah dan dinilai menurun, yaitu pada tahun 2011-2015 sudah termasuk kuadran I (wilayah maju) dan tahun 2019 kuadran IV menjadi kuadran IV (wilayah tertinggal). Sedangkan untuk perubahan yang terjadi pada tahun 2020 di seluruh wilayah memiliki

angka pertumbuhan ekonomi negatif namun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya lebih besar dibandingkan provinsi sehingga klasifikasi wilayah meningkat menjadi wilayah berkembang (Kuadran II). Pada tahun 2020 penurunan tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi saja namun pendapatan perkapita juga menurun di seluruh wilayah. Dilihat dari grafik selisih pendapatan perkapita Kabupaten Dharmasraya terhadap pada tahun 2020 yang semakin membesar dan berada di bawah rata-rata provinsi menunjukkan ketimpangan yang membesar, dengan kontribusi sektor tersier yang semakin membesar.

Berdasarkan uraian mengenai ketimpangan kabupaten dan kota diatas, diketahui selisih pendapatan perkapita digunakan untuk melihat ketimpangan yang ada di kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan karena kondisi ekonomi yang berbeda pada setiap tahunnya. Wilayah yang dianggap timpang adalah wilayah yang memiliki grafik selisih Pola II dan Pola III.

Pada tahun 2011-2019 wilayah Pola II yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan salah satu wilayah Pola III yaitu Kabupaten Dharmasraya memiliki ketimpangan yang semakin membesar. Dari segi klasifikasi wilayah pada kedua pola ini sebagian besar merupakan wilayah relatif tertinggal yang bergerak menuju wilayah berkembang. Dari kontribusi sektor di kedua pola ini merupakan wilayah dengan perkeonomian yang belum maju, dimana perubahan nilai kontribusi sektor jika dikaitkan dengan ketimpangan maka menunjukkan hubungan yang berbeda-beda. Seperti pada kabupaten dengan kontribusi terbesar dari sektor Primer, ketimpangan wilayah membesar sementara nilai kontribusi sektor Primer menurun. Sedangkan untuk kabupaten dengan kontribusi terbesar dari sektor Tersier, ketimpangan wilayah membesar dan nilai kontribusi sektor Tersier juga meningkat. Artinya terdapat hubungan yang berlawanan arah antara ketimpangan wilayah dan kontribusi sektor primer, sedangkan hubungan yang searah antara ketimpangan wilayah dengan kontribusi sektro tersier.

Kemudian berdasarkan beberapa teori bahwa besaran pendapatan perkapita dipengaruhi oleh jumlah penduduk, dimana pendapatan perkapita akan lebih besar jika pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan pertumbuhan penduduk. Hal ini

terbukti dengan nilai pendapatan perkapita yang semakin meningkat di seluruh wilayah pada tahun 2011-2019, karena pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan pertumbuhan penduduk, sehingga bertambahnya jumlah penduduk ini tidak menjadi tekanan dalam perekonomian. Sedangkan pada tahun 2020 ditemukan kondisi yang berbeda. Menurunnya kondisi ekonomi tersebut jika dihubungkan dengan adanya wabah pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, hal ini merupakan dampak dari terjadinya wabah tersebut. Dilihat dari pendapatan perkapita di seluruh wilayah mengalami penurunan, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan perkapita dan juga menyebabkan perubahan klasifikasi wilayah di beberapa kabupaten dan kota.

Sedangkan pada tahun 2020 jika ketimpangan wilayah dikaitkan dengan adanya perubahan atau penurunan kondisi ekonomi yang terjadi, pengaruh dari kondisi tersebut dirasakan di seluruh wilayah, terlebih pada wilayah yang timpang. Hal ini terlihat dari ketimpangan yang masih terjadi di wilayah dengan grafik selisih Pola II, namun ketimpangan pada tahun 2020 lebih kecil dibandingkan tahun 2019. Selain itu pengaruh yang terlihat sangat jelas berada pada wilayah dengan grafik selisih Pola III yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Dharmasraya yang memiliki ketimpangan yang semakin membesar pada tahun 2020.

Pada masa tahun 2020 terkait adanya wabah pandemi COVID-19 ini diberlakukan beberapa kebijakan baru seperti adanya pembatasan kegiatan menyebabkan kegiatan ekonomi maupun non ekonomi tidak dapat berjalan normal seperti biasanya, kondisi ini berdampak pada pendapatan yang dihasilkan oleh sektor utama yang berpengaruh terhadap pendapatan di beberapa kabupaten. Namun hal tersebut tidak berdampak pada ketimpangan di kota. Meski pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita di kota juga menurun, namun hal ini tidak menyebabkan kondisi ekonomi di kota berada di bawah rata-rata provinsi. Hal ini disebabkan oleh kontribusi sektor tersier di kota mengalami peningkatan. Artinya, meski mengalami guncangan ekonomi pada tahun 2020 namun pendapatan dari sektor tersier masih mampu menopang perekonomian di kota.

4.3 KESIMPULAN HASIL ANALISIS

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka kesimpulan analisis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15
Kesimpulan Hasil Analisis

No	Analisis	Kesimpulan
1	Identifikasi Kondisi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi sektor terbesar di kabupaten ada yang tetap berasal dari satu sektor dan ada yang berasal dari sektor yang berbeda-beda di setiap tahun - Kontribusi sektor terbesar di kota berasal dari satu sektor yang sama di setiap tahun, yaitu sektor tersier. - Terdapat wilayah dengan klasifikasi yang tetap dan wilayah dengan klasifikasi yang berubah di setiap tahun. Sehingga disimpulkan bahwa kabupaten kota terdiri dari wilayah maju dan cepat tumbuh, wilayah maju tapi tertekan yang bergerak menuju wilayah maju dan cepat tumbuh, wilayah maju tapi tertekan, wilayah berkembang cepat, dan wilayah relatif tertinggal.
2	Analisis Ketimpangan Ekonomi Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Ketimpangan di setiap wilayah memiliki pola yang berbeda-beda dan hanya terjadi di kabupaten - Pada tahun 2011-2019 ketimpangan yang membesar terjadi pada wilayah dengan grafik pola II dan salah satu wilayah di pola III, sedangkan pada tahun 2020 ketimpangan masih terjadi di wilayah Pola II dan semakin membesar di wilayah dengan grafik Pola III. - Kontribusi sektor primer memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan ketimpangan, dimana jika ketimpangan besar maka kontribusi sektor primer menurun. Sedangkan kontribusi sektor tersier memiliki hubungan yang searah dengan ketimpangan, jika ketimpangan meningkat kontribusi sektor tersier juga meningkat

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penelitian

Hasil dari kondisi ekonomi wilayah menunjukkan bahwa kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat terdiri dari wilayah dengan perekonomian yang sudah maju dan modern dengan sektor utama tersier, wilayah yang bergerak menuju perekonomian modern dengan sektor utama yang berubah dari sektor primer ke tersier, dan wilayah dengan perekonomian yang masih tradisional atau belum maju dengan sektor utama primer. Sementara dari klasifikasi wilayah yang tetap dan yang berubah di setiap tahun menjadikan kabupaten kota terdiri dari wilayah maju dan cepat tumbuh, wilayah tertekan yang bergerak menuju wilayah maju cepat tumbuh, wilayah maju tapi tertekan, wilayah berkembang cepat dan wilayah tertinggal.

Berdasarkan perbedaan kondisi ekonomi tersebut terlihat adanya ketimpangan yang terjadi antara kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, dari selisih pendapatan perkapita kabupaten dan kota terhadap provinsi dan diperoleh bahwa ketimpangan hanya terjadi di sebagian besar wilayah kabupaten yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih kecil dari provinsi. Pada tahun 2011-2019 ketimpangan yang semakin membesar terjadi pada kabupaten yang memiliki grafik selisih Pola II dan Pola III, sedangkan untuk ketimpangan yang terjadi di tahun 2020 terjadi di wilayah Pola II dan Pola III. Dari analisis ketimpangan yang terjadi pada tahun 2011-2020 bahwa pada wilayah dengan kontribusi sektor utama primer yang menurun ketimpangan wilayahnya membesar, sedangkan wilayah dengan kontribusi sektor tersier yang meningkat ketimpangan wilayahnya membesar pula. Sehingga disimpulkan bahwa kontribusi sektor primer memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan ketimpangan, sementara kontribusi sektor tersier memiliki hubungan yang searah dengan ketimpangan.

Kemudian jika dikaitkan dengan kondisi pada tahun 2020 terkait wabah pandemi COVID-19 karena adanya pembatasan dalam kegiatan ekonomi dan pemberlakuan kebijakan baru dan pembatasan kegiatan baik ekonomi maupun non ekonomi, sehingga kondisi ekonomi menurun di seluruh wilayah, namun lebih berdampak pada wilayah dengan ketimpangan yang membesar pada tahun 2020.

5.2 Rekomendasi

Sesuai dengan kesimpulan pada analisis ini maka peneliti memberikan rekomendasi terhadap permasalahan dan kondisi yang ada, yang ditujukan kepada beberapa pihak seperti berikut ini.

a. Pemerintah Daerah

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten kota sebaiknya tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi namun juga memperhatikan pemerataan dari pendapatan perkapita yang disesuaikan dengan sektor utama pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

b. Mahasiswa

Berangkat dari permasalahan ketimpangan yang tidak dapat dihindari dalam proses pembangunan, memungkinkan untuk melakukan penelitian atau kajian serupa di provinsi-provinsi lain sebagai perbandingan. Selain itu dapat pula mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan khususnya Provinsi Sumatera Barat, atau juga dapat dilakukan di provinsi lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, Titin. 2006. Tipologi Sektoral Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat: Universitas HKBP Nommensen
- Amala, Ritmon dan Abdul Rauf Malayang. 2018. "Analisis Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Se-Sulawesi". Gorontalo : Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 14 No 42 IAIN Sultan Amai Gorontalo
- Aprianoor, Aprita dan Muhammad Muktiali. 2015. "Kajian Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jawa Barat". Semarang : Universitas Diponegoro
- Aswan, dkk. 2019. "Analisis Kontribusi Sektor-Sektor Perekonomian Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kota Parepare" Center of Economic Students Jurnal Vol 2 No 3. Makassar: Universitas Muslim Indonesia
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2011. Indeks Pembangunan Regional
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2019. Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2010-2019, Badan Pusat Statistik, Sumatera Barat
- Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota Dalam Angka. 2019. Dalam Angka Tahun 2010-2019, Badan Pusat Statistik, Sumatera Barat
- BAPPEDA Kabupaten Buleleng. 2017. Teori dan Indikator Pembangunan <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-dan-indikator-pembangunan-12> (diakses pada 10 April 2021)
- Cahyono, S. Andy. 2015. "Pertumbuhan Dan Ketimpangan Ekonomi Di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo tahun 2008-2013" . Jurnal Penelitian Hutan dan Konversi Alam Vol 12 No 1 : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan
- Damarjati, Anisa Ganis. 2010. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesenjangan Pendapatan Di Propinsi Jawa Tengah". Semarang : Universitas Diponegoro
- Djaljoeni, N. 1998. Geografi Kota dan Desa. Bandung : Alumni ITB
- Digdowniseiso, Kumba. 2019. Teori Pembangunan. Jakarta : Lembaga Penerbitan Universitas Nasional
- Dosen Pendidikan. 2021. Pengertian Pembangunan Menurut Pendapat Ahli. <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli/> (akses pada 11 April 2021)
- Fadhilah, Diena. 2010. "Analisis Perubahan Struktur Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara". Medan. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

- Haikal, Muhammad. 2020. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Di Provinsi Sumatera Utara”. Medan : Universitas Sumatera Utara
- Hartono, Budiantoro. 2008. “Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah”. Semarang : Universitas Diponegoro
- Ikhsan, Easbi dan Nadra Yudelsa Ratu. 2020. “Struktur Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Sumatera Barat”. Sumatera Barat : Jurnal Pembangunan Nagari Balitbang Sumatera Barat
- Ilham, Muhammad. 2015. “Analisis Ketimpangan Ekonomi Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2011 – 2015”. Yogyakarta : Jurnal Bumi Indonesia, Perpustakaan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada
- Iswanto, Denny. 2015. “Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur”. Jurnal Ilmu Ekonomi Signifikan Vol 4 No 1. Tangerang Selatan : Universitas Islam Negeri Jakarta
- Masli, Lili dan . 2009. “Analisis Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat”. Bandung : Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi LPPM STIE STAN Indonesia Mandiri Volume II No 1
- Muta’ali, Lutfi. 2015. *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada
- Ningtyas, Sri Aulia. 2019. “Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Provinsi Sumatera Selatan”. Semarang : Universitas Diponegoro
- Pasaribu, Cyntia Mutiara. 2015. “Kajian Isu Pemekaran di Kota Medan (Tinjauan Berdasarkan Kondisi Ketimpangan Wilayah”. Semarang : Jurnal Wilayah dan Lingkungan Volume 3 Nomor 3 Universitas Diponegoro
- Pratiwi, Angela Gera dan Lutfi Muta’ali. 2016. “Perkembangan Ekonomi Wilayah dan Peran Sektor Tersier di Kawasan Jabodetabek”. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada
- Rahardja, Prathama. Mandala Manurung. 2004. *Pengantar Teori Ekonomi Makro Edisi Kedua*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Rahayu, Eta dan Eko Budi Santoso. 2014. “Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Dalam Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Gunungkidul”. Surabaya. Jurnal Teknik ITS Vol 3 No 2 : Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Ratnasari, Yeni. 2014. “Penentuan Tipologi Kesenjangan Wilayah di Kabupaten Lamongan Berdasarkan Aspek Ekonomi dan Sosial”. Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh November

- Rustiadi Ernan, dkk. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Cetakan ke 2*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sahar. 2018. “Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten Lombok Barat”. Mataram : Jurnal Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi 154 Vol. 4 No.2 Universitas Islam Al-Azhar
- Saifullah, Erwin. 2020. “Analisis Transformasi Struktur Perekonomian Dalam Sektor Primer, Sekunder Dan Tersier dengan Analisis LQ Dan Shift Share Perspektif Ekonomi Islam”. Lampung : UIN Raden Intan
- Saratri, Wilonoyudho. 2009. “Kesenjangan dalam Pengembangan Wilayah”. Forum Geografi, Vol 23 No 2. Semarang : Universitas Negeri Semarang
- Suri, Katrina Aprilia dkk. 2017. “Tipologi Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota Menggunakan Metode Multidimensional Scaling Di Pulau Timor”. Malang : Institut Teknologi Nasional
- Soeratno. 2004. *Ekonomi Makro Pengantar*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
- Tarigan, Robinson. 2003. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Rajawali Press.
- Tulus T.H. Tambunan. 2007. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Umi Kalsum. 2015. “Pengaruh Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara”. Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Wahidin, dkk. 2021. “Analisis Pola dan Struktur Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kota Mataram dan Hubungan Kota Mataram dengan Kabupaten Sekitarnya di Pulau Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 3 No 1. Mataram: Universitas Mataram
- Zakiyah, Ilmiyatus. 2019. “Analisis Spasial Tingkat Perkembangan Wilayah Perkotaan Di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur”. Yogyakarta. Pendidikan Geografi Program Magister : Universitas Negeri Yogyakarta

DESIGN SURVEY

A. Latar Belakang

Salah satu tantangan dalam pembangunan di Indonesia adalah mengatasi ketimpangan. Ketimpangan merupakan hal umum yang terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah karena adanya perbedaan kondisi pada masing-masing wilayah. Ketimpangan wilayah adalah kondisi kesenjangan atau ketidakmerataan di suatu wilayah, sehingga menimbulkan selisih antar wilayah. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di pesisir Pulau Sumatera, terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota yang masih terus melakukan upaya pembangunan. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2018-2020 cenderung menurun, dimana seluruh kabupaten dan kota memiliki laju pertumbuhan yang negatif. Dua hal terpenting dalam pembangunan adalah pertumbuhan dan pemerataan, ketika belum tercapai maka akan timbul suatu ketimpangan kesenjangan atau ketimpangan (Sirojuzilam, 2005).

Ketimpangan juga berarti ketidakmerataan atau kesenjangan. Kesenjangan juga terlihat dari pendapatan perkapita antar wilayah. Berdasarkan data dari BPS Sumatera Barat tahun 2020 pendapatan perkapita di Provinsi Sumatera Barat sebesar 30,79 juta rupiah, pendapatan perkapita tertinggi berada di Kota Padang Panjang 49,95 juta rupiah sementara pendapatan perkapita terendah di Kabupaten Pesisir Selatan 18,78 juta rupiah. Data tersebut menunjukkan masih ada kabupaten yang memiliki pendapatan perkapita dibawah pendapatan perkapita di provinsi dan memiliki selisih atau perbedaan angka yang cukup jauh. Selisih yang cukup jauh inilah yang menandakan adanya ketimpangan.

Ketimpangan disebabkan dan menyebabkan pembangunan yang tidak merata, jika dibiarkan akan menghambat daerah didalamnya untuk berkembang. Hal tersebut menjadi alasan kuat untuk mengkaji ketimpangan wilayah. Dalam penelitian ini, sebelum mengkaji ketimpangan wilayah yang ada, akan dilihat terlebih dahulu bagaimana kondisi perekonomian dari tiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat sebab kondisi yang terjadi di Provinsi secara keseluruhan tidak terlepas

dari wilayah-wilayah yang ada di dalamnya. Dari teridentifikasinya kondisi ekonomi yang ada, kemudian barulah dikaji mengenai ketimpangannya.

Ketimpangan yang terjadi jika dibiarkan akan semakin melebar dan akan semakin parah, hingga menghambat pembangunan di suatu wilayah. Dengan alasan tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul “Kajian Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi perekonomian dan ketimpangan ekonomi antar kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi ekonomi dan ketimpangan ekonomi antar kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Sementara sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Dari tujuan yang telah dipaparkan diatas, maka sasaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- d. Menghitung kontribusi sektor
- e. Mengidentifikasi klasifikasi wilayah
- f. Menganalisis ketimpangan ekonomi

D. Ruang Lingkup

Suatu penelitian dapat diberikan batasan-batasan yang dapat memudahkan dalam penyelesaian tahap studi penelitian. Batasan yang ditentukan dalam penelitian ini dimuat dalam ruang lingkup wilayah studi dan ruang lingkup materi.

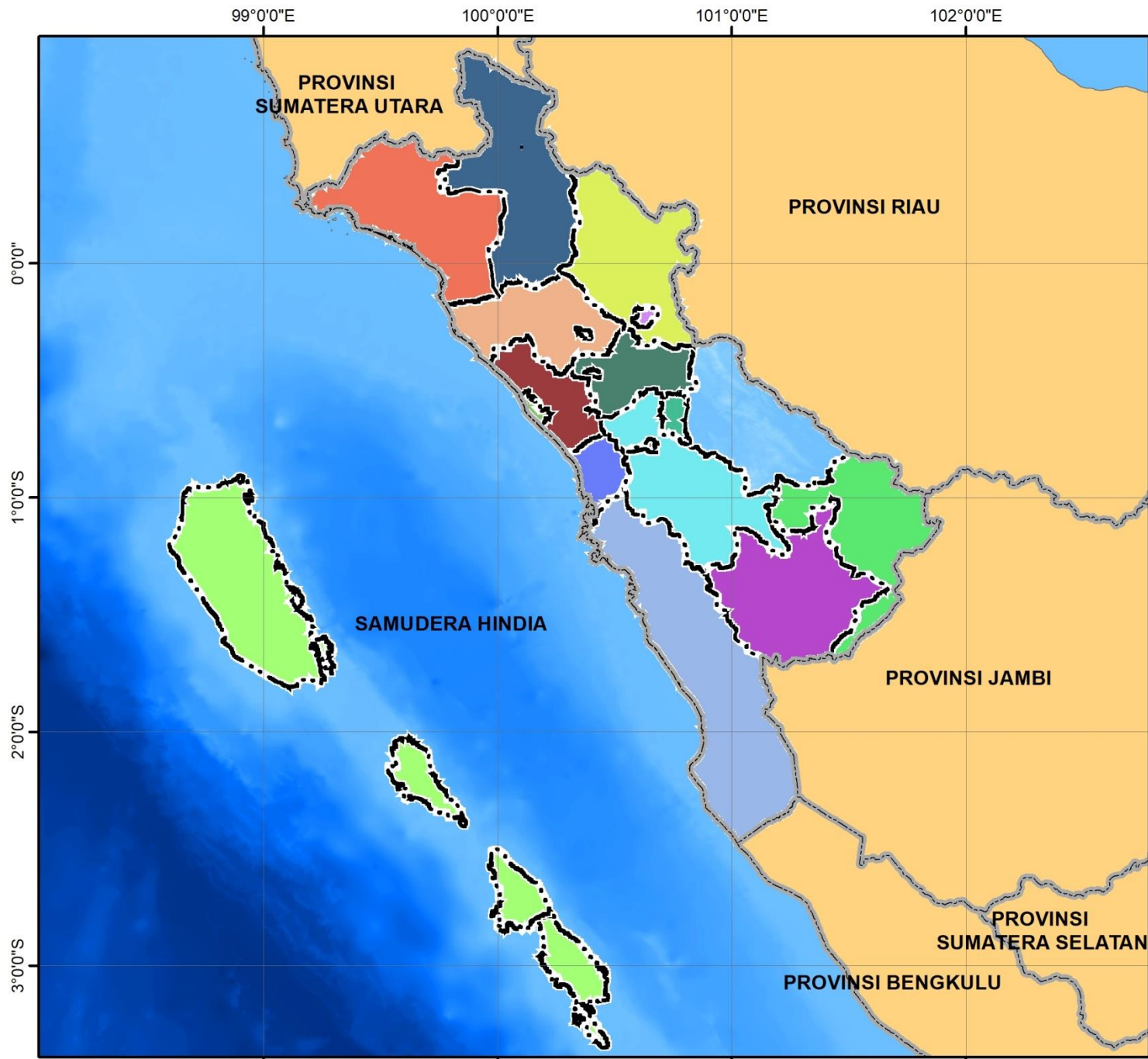
1) Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian dilakukan dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat, dengan total luas wilayah 4.201.289 ha yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota. Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5.498.751 jiwa. Provinsi Sumatera Barat memiliki luas administrasi wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau
- Sebelah Selatan : Provinsi Bengkulu

- Sebelah Timur : Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu
- Sebelah Barat : Samudera Hindia

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Peta Administrasi Wilayah Provinsi Sumatera Barat.



TUGAS AKHIR	
Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat	
	1:2.500.000
LEGENDA	
Batas Administrasi	
Batas Provinsi Batas Kab./Kota	
Perairan	
Laut	
Kabupaten/Kota	
Kab. Agam Kab. Dharmasraya Kab. Kep. Mentawai Kab. Limapuluh Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Barat Kab. Pesisir Selatan Kab. Sawahlunto/Sijunjung Kab. Solok	Kab. Solok Selatan Kab. Tanah Datar Kota Bukittinggi Kota Padang Kota Padang Panjang Kota Pariaman Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok
Dibuat Oleh: MARDHOTILLAH ASTRI 1510015311017	
Pembimbing 1: Ir. Hamdi Nur, M.T Pembimbing 2: Wenny Wdya Wahyudi, SP, M.Si	
Peta Inset 	
Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia 1:2.500.000	
JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS BUNG HATTA	

2) Ruang Lingkup Materi

Materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah kondisi ekonomi dan ketimpangan ekonomi. Diawali dengan identifikasi kondisi ekonomi dari kontribusi sektor dan klasifikasi wilayah dari tipologi klassen, Indeks Williamson dan selisih pendapatan perkapita kabupaten kota terhadap provinsi. Penelitian ini mengamati perubahan dalam jangka panjang yaitu 10 tahun yang dipisah menjadi 4 titik tahun yaitu 2011, 2015, 2019 dan 2020 karena pada tahun 2020 terlihat adanya perubahan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

E. Metodologi Penelitian

Dalam menjawab permasalahan dan tujuan dari penelitian ini harus menggunakan metode yang tepat. Tahapan yang termasuk dalam metode analisis terdiri dari tiga tahap yaitu metod pendekatan studi, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1) Metode Pendekatan Studi

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana metode kuantitatif digunakan untuk perhitungan statistik sederhana sedangkan metode deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran atau kesimpulan dari analisis dalam kalimat, tabel maupun gambar sehingga mudah untuk dipahami. Berikut merupakan tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian.

2) Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan cara sebagai berikut.

a) Survey Instansi

Penulis melakukan survey ke instansi yang menyediakan data yang dibutuhkan terkait penelitian yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat

b) *Library Reasearch*

Penulis melakukan pengumpulan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, bersumber dari buku, jurnal penelitian atau artikel ilmiah, data dari internet dan lain-lain.

3) Metode Analisa Data

Metode analisa data merupakan tahap dalam menganalisis atau mengolah data yang telah didapat, sehingga dapat menjawab tujuan atau permasalahan dalam penelitian. Berikut merupakan tahap analisis yang dibahas dalam penelitian ini.

1. Identifikasi Kondisi Ekonomi Kabupaten Kota

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi ekonomi yang dilihat dari kontribusi sektor dan klasifikasi kabupaten kota. Identifikasi kondisi ekonomi ini dilihat dari kontribusi sektor di kabupaten dan kota serta klasifikasi wilayah kabupaten dan kota.

2. Analisis ketimpangan ekonomi wilayah

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat menggunakan rumus Indeks Williamson dan ketimpangan antar kabupaten kota melalui nilai selisih pendapatan perkapita kabupaten kota terhadap provinsi. Dari ketimpangan di tingkat provinsi diketahui perubahan ketimpangan, kecenderungan perubahan ketimpangan (*trend*) dan kategori ketimpangan. Sedangkan untuk ketimpangan antara kabupaten kota akan diperoleh kabupaten atau kota mana saja yang timpang dan dilihat perubahan ketimpangan tersebut pada setiap tahun.

F. Keluaran Penelitian

Keluaran dalam penelitian ini adalah mengetahui ketimpangan ekonomi yang terjadi di kabupaten dan kota yang dilihat dari kondisi ekonomi kabupaten dan kota pada tahun 2011-2020.

Lampiran 2

Tabel List Kebutuhan Data Penelitian

No	Data	Tahun	Metode Pengumpulan	Sumber	Kegunaan
1	PDRB ADHK Kabupaten dan Kota	2011-2020	Survey Instansi	<ul style="list-style-type: none"> - BPS Provinsi Sumatera Barat - BPS Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat 	Sebagai data untuk mengetahui kondisi ekonomi di kabupaten dan kota
2	PDRB Lapangan Usaha Kabupaten dan Kota				Sebagai data untuk mengetahui kontribusi sektor di kabupaten dan kota
3	PDRB Perkapita Kabupaten dan Kota				Sebagai indikator untuk analisis tipologi kelas dan ketimpangan ekonomi wilayah
4	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten dan Kota				Sebagai indikator untuk analisis tipologi kelas Untuk melihat pengaruh terhadap pendapatan perkapita yang dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi
5	Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota				Sebagai indikator terkait yang mempengaruhi pendapatan perkapita
6	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten dan Kota				Untuk melihat pengaruh terhadap pendapatan perkapita yang dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi
7	Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat	Tahun terbaru		-RTRW Provinsi Sumatera Barat	Sebagai data pada gambaran umum wilayah penelitian
8	Teori terkait penelitian	2011-2020	<i>Library Research</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Buku - Jurnal penelitian - artikel ilmiah - publikasi ininternet 	Sebagai standar atau teori terkait penelitian

Lampiran 3

Tabel Kontribusi Lapangan Usaha di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011

No	Wilayah	Sektor Lapangan Usaha																
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M,N	O	P	Q	RSTU
1	Kab. Kep.Mentawai	51.44	1.77	3.51	0.02	0.00	10.19	11.93	9.43	0.58	0.86	0.12	0.94	0.04	7.07	0.85	0.55	0.69
2	Kab. Pesisir Selatan	41.27	4.01	8.75	0.04	0.07	8.80	11.45	3.41	1.02	5.89	2.27	1.42	0.05	6.85	2.54	1.17	0.99
3	Kab. Solok	41.84	5.59	5.55	0.02	0.06	7.28	9.69	10.80	0.71	5.23	1.75	0.82	0.07	5.94	2.58	1.14	0.93
4	Kab. Sijunjung	32.74	15.13	3.50	0.03	0.04	10.96	11.64	6.90	0.65	3.19	2.44	1.31	0.02	5.21	3.39	1.49	1.36
5	Kab. Tanah Datar	35.42	2.80	13.19	0.02	0.12	8.29	11.75	7.50	0.60	4.38	2.54	1.56	0.04	6.61	2.42	1.16	1.60
6	Kab. Padang Pariaman	23.17	5.93	13.69	0.03	0.06	7.42	9.56	22.33	0.81	3.22	1.56	1.06	0.08	5.33	4.08	0.53	1.15
7	Kab. Agam	33.71	3.99	13.45	0.02	0.05	6.53	17.97	5.60	0.73	4.95	1.34	1.90	0.04	4.31	3.80	0.95	0.66
8	Kab. Lima Puluh Kota	38.92	7.91	8.47	0.01	0.03	4.22	13.63	8.07	0.56	4.43	1.67	1.17	0.03	6.22	2.32	1.24	1.09
9	Kab. Pasaman	53.21	2.01	5.02	0.02	0.11	4.14	12.22	3.90	0.73	4.21	2.28	1.38	0.05	7.18	1.86	0.88	0.80
10	Kab. Solok Selatan	35.21	8.24	6.22	0.02	0.05	10.37	18.50	5.67	0.71	4.29	0.85	0.85	0.01	4.96	1.96	1.04	1.04
11	Kab. Dharmasraya	30.91	12.32	6.71	0.02	0.01	10.87	12.12	5.36	0.78	5.59	2.13	2.10	0.02	6.82	2.15	1.43	0.67
12	Kab. Pasaman Barat	47.06	1.48	16.38	0.02	0.01	5.18	10.22	4.23	0.45	4.53	1.70	1.33	0.05	3.89	1.89	1.01	0.54
13	Kota Padang	5.04	2.98	17.09	0.11	0.17	8.59	17.73	15.33	1.05	7.56	4.97	3.19	1.48	7.15	4.13	1.39	2.04
14	Kota Solok	6.83	0.69	6.14	0.05	0.22	11.97	24.82	14.90	1.95	6.49	4.35	2.75	0.02	10.16	4.52	1.39	2.75
15	Kota Sawahlunto	9.36	10.94	12.28	1.74	0.33	9.14	14.73	8.06	1.61	6.49	3.31	1.77	0.13	13.09	2.30	0.95	3.76
16	Kota Padang Panjang	6.13	0.29	11.33	0.06	0.31	8.48	19.04	12.84	2.10	8.84	4.06	3.82	0.07	10.39	6.86	1.28	4.11
17	Kota Bukittinggi	1.69	0.00	8.26	0.72	0.18	6.33	32.20	11.00	4.05	7.33	5.83	3.65	0.75	6.75	4.74	2.84	3.66
18	Kota Payakumbuh	7.79	0.59	6.30	0.06	0.43	11.83	23.16	13.89	2.33	7.38	6.15	3.01	0.28	8.30	3.77	1.45	3.29
19	Kota Pariaman	20.72	2.14	8.90	0.05	0.04	12.67	15.70	12.72	1.54	6.64	3.00	2.77	0.14	6.31	3.30	1.00	2.37

Sumber : Analisis Tahun 2021

Keterangan :

A = Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

B = Pertambangan dan Penggalian

C = Industri Pengolahan

D = Pengadaan Listrik dan Gas

E = Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

F = Konstruksi

G = Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

H = Transportasi dan Pergudangan

I = Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

J = Informasi dan Komunikasi

K = Jasa Keuangan dan Asuransi

L = Real Estate

M,N = Jasa Perusahaan

O = Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

P = Jasa Pendidikan

Q = Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

R,S,T,U = Jasa Lainnya

Lampiran 4

Tabel Kontribusi Lapangan Usaha di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

No	Wilayah	Sektor Lapangan Usaha																
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M,N	O	P	Q	RSTU
1	Kab. Kep.Mentawai	49.07	1.71	3.53	0.02	0.00	11.76	12.46	9.80	0.62	0.99	0.13	0.94	0.05	6.68	0.95	0.59	0.72
2	Kab. Pesisir Selatan	39.87	3.80	8.72	0.03	0.07	9.53	12.05	3.76	0.97	6.60	2.22	1.42	0.05	5.91	2.77	1.27	0.96
3	Kab. Solok	38.82	5.60	5.86	0.02	0.06	8.04	10.38	11.00	0.71	6.45	1.74	0.81	0.07	5.46	2.86	1.24	0.88
4	Kab. Sijunjung	30.78	15.36	3.41	0.03	0.04	11.98	11.66	7.32	0.60	3.58	2.37	1.25	0.02	4.61	3.82	1.65	1.51
5	Kab. Tanah Datar	32.38	2.87	12.57	0.02	0.12	9.02	12.75	8.53	0.60	5.19	2.63	1.57	0.04	6.15	2.66	1.28	1.61
6	Kab. Padang Pariaman	21.82	5.90	13.42	0.03	0.05	8.06	9.83	22.50	0.79	3.78	1.59	1.02	0.08	5.03	4.33	0.58	1.18
7	Kab. Agam	31.74	3.93	13.04	0.02	0.05	6.94	18.80	6.28	0.70	5.73	1.34	1.84	0.04	3.80	4.00	1.05	0.69
8	Kab. Lima Puluh Kota	35.89	8.10	8.18	0.02	0.03	4.68	14.59	9.26	0.56	5.22	1.69	1.17	0.03	5.52	2.60	1.33	1.14
9	Kab. Pasaman	51.23	1.98	4.85	0.02	0.10	4.40	12.94	4.34	0.74	4.88	2.40	1.35	0.05	6.91	2.06	0.93	0.81
10	Kab. Solok Selatan	32.88	8.29	6.01	0.02	0.05	11.49	18.68	6.19	0.70	5.26	0.86	0.82	0.01	4.50	2.03	1.12	1.07
11	Kab. Dharmasraya	29.78	10.49	6.29	0.02	0.01	12.16	12.88	5.96	0.79	6.84	2.18	2.08	0.02	5.96	2.31	1.56	0.67
12	Kab. Pasaman Barat	44.96	1.47	16.43	0.02	0.01	5.76	10.66	4.60	0.46	5.34	1.77	1.37	0.05	3.43	2.06	1.09	0.52
13	Kota Padang	4.81	2.95	15.86	0.11	0.17	9.60	17.23	16.31	1.04	8.26	5.12	3.15	1.48	5.97	4.40	1.50	2.05
14	Kota Solok	5.96	0.68	5.85	0.05	0.20	12.35	25.12	15.86	1.93	7.37	4.36	2.62	0.02	8.63	4.77	1.49	2.74
15	Kota Sawahlunto	8.82	8.41	12.41	1.82	0.35	10.22	15.45	8.54	1.64	7.49	3.36	1.71	0.13	11.85	2.59	1.03	4.17
16	Kota Padang Panjang	5.37	0.29	11.07	0.06	0.29	9.16	18.54	13.50	2.18	9.88	4.20	3.59	0.08	8.95	7.51	1.35	3.97
17	Kota Bukittinggi	1.37	0.00	7.57	0.73	0.16	6.41	32.87	11.16	4.50	7.69	5.93	3.44	0.69	5.77	4.91	3.10	3.69
18	Kota Payakumbuh	7.08	0.57	5.91	0.06	0.37	12.54	23.39	13.83	2.44	8.60	6.30	2.91	0.28	7.08	3.87	1.53	3.23
19	Kota Pariaman	18.94	1.98	8.56	0.05	0.04	13.88	15.48	12.16	1.69	8.41	3.03	2.84	0.14	5.51	3.53	1.10	2.64

Sumber : Analisis Tahun 2021

Keterangan :

A = Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

B = Pertambangan dan Penggalian

C = Industri Pengolahan

D = Pengadaan Listrik dan Gas

E = Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

F = Konstruksi

G = Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

H = Transportasi dan Pergudangan

I = Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

J = Informasi dan Komunikasi

K = Jasa Keuangan dan Asuransi

L = Real Estate

M,N = Jasa Perusahaan

O = Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

P = Jasa Pendidikan

Q = Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

R,S,T,U = Jasa Lainnya

Lampiran 5

Tabel Kontribusi Lapangan Usaha di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Wilayah	Sektor Lapangan Usaha																
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M,N	O	P	Q	RSTU
1	Kab. Kep.Mentawai	45.86	1.56	2.89	0.03	0.00	13.49	13.45	10.32	0.68	1.18	0.11	0.95	0.05	6.88	1.08	0.63	0.84
2	Kab. Pesisir Selatan	36.46	3.73	7.55	0.03	0.07	10.75	13.18	4.24	1.14	7.78	2.03	1.42	0.05	6.01	3.01	1.36	1.16
3	Kab. Solok	35.88	5.23	5.17	0.02	0.06	9.08	11.28	11.24	0.83	7.43	1.65	0.82	0.07	5.61	3.32	1.34	0.98
4	Kab. Sijunjung	27.44	14.77	2.98	0.04	0.04	13.43	12.44	8.00	0.70	4.23	2.09	1.24	0.02	4.67	4.33	1.84	1.77
5	Kab. Tanah Datar	29.21	2.92	11.42	0.02	0.12	9.96	13.68	9.48	0.68	5.93	2.46	1.55	0.04	6.28	3.03	1.37	1.85
6	Kab. Padang Pariaman	20.87	6.03	12.19	0.03	0.05	8.89	10.28	21.61	0.89	4.31	1.50	1.03	0.09	5.18	5.03	0.66	1.35
7	Kab. Agam	29.46	3.57	11.39	0.03	0.05	7.90	19.22	7.30	0.77	6.84	1.18	1.84	0.04	3.89	4.58	1.12	0.81
8	Kab. Lima Puluh Kota	32.41	7.64	7.25	0.02	0.03	5.15	15.68	10.79	0.63	6.19	1.56	1.15	0.03	5.69	2.94	1.52	1.32
9	Kab. Pasaman	48.09	1.94	4.39	0.02	0.10	4.88	14.12	4.87	0.84	5.72	2.25	1.36	0.05	7.05	2.37	1.02	0.94
10	Kab. Solok Selatan	29.42	7.97	4.94	0.03	0.05	12.56	20.01	6.95	0.78	6.20	0.76	0.82	0.02	4.75	2.31	1.22	1.21
11	Kab. Dharmasraya	28.52	7.42	5.57	0.02	0.01	13.69	14.00	6.66	0.85	7.95	2.01	2.11	0.02	6.03	2.63	1.71	0.79
12	Kab. Pasaman Barat	42.86	1.52	14.35	0.02	0.01	6.49	11.76	5.20	0.53	6.52	1.67	1.40	0.06	3.53	2.30	1.17	0.62
13	Kota Padang	4.69	2.90	12.84	0.10	0.16	10.12	17.05	17.87	1.13	9.49	4.50	2.97	1.47	5.93	4.78	1.63	2.38
14	Kota Solok	5.15	0.58	4.87	0.05	0.19	12.59	25.21	16.80	2.09	8.22	3.99	2.52	0.02	8.24	5.13	1.49	2.85
15	Kota Sawahlunto	7.79	6.74	11.20	2.07	0.37	10.80	15.85	9.39	1.82	8.66	3.07	1.69	0.13	11.67	2.89	1.11	4.74
16	Kota Padang Panjang	4.74	0.24	9.36	0.06	0.25	9.46	18.30	14.07	2.32	10.91	3.75	3.43	0.08	8.92	8.45	1.38	4.29
17	Kota Bukittinggi	1.12	0.00	5.93	0.72	0.14	6.66	33.47	11.93	4.71	8.33	5.26	3.22	0.66	5.47	5.25	3.32	3.80
18	Kota Payakumbuh	6.02	0.50	5.42	0.06	0.31	13.26	23.70	13.61	2.77	9.71	5.66	2.74	0.26	6.74	4.16	1.57	3.50
19	Kota Pariaman	16.74	1.82	7.79	0.06	0.04	15.09	16.11	11.11	2.00	9.90	2.68	2.77	0.14	5.57	3.88	1.19	3.10

Sumber : Analisis Tahun 2021

Keterangan :

A = Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

B = Pertambangan dan Penggalian

C = Industri Pengolahan

D = Pengadaan Listrik dan Gas

E = Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

F = Konstruksi

G = Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

H = Transportasi dan Pergudangan

I = Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

J = Informasi dan Komunikasi

K = Jasa Keuangan dan Asuransi

L = Real Estate

M,N = Jasa Perusahaan

O = Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

P = Jasa Pendidikan

Q = Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

R,S,T,U = Jasa Lainnya

Lampiran 6

Tabel Kontribusi Lapangan Usaha di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Wilayah	Sektor Lapangan Usaha																
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M,N	O	P	Q	RSTU
1	Kab. Kep.Mentawai	48.21	1.58	2.94	0.03	0.00	13.32	13.70	7.49	0.64	1.32	0.12	0.96	0.05	7.01	1.18	0.69	0.77
2	Kab. Pesisir Selatan	36.85	3.64	7.40	0.03	0.07	10.24	13.28	3.81	1.00	8.44	2.06	1.44	0.05	6.04	3.18	1.47	1.01
3	Kab. Solok	36.60	5.12	5.08	0.02	0.06	8.86	11.32	10.05	0.76	8.10	1.68	0.83	0.07	5.63	3.51	1.45	0.88
4	Kab. Sijunjung	27.78	14.76	2.95	0.04	0.04	13.01	12.55	7.23	0.64	4.63	2.14	1.26	0.02	4.69	4.60	2.01	1.66
5	Kab. Tanah Datar	29.85	2.84	11.31	0.02	0.12	9.57	13.80	8.66	0.61	6.51	2.50	1.57	0.04	6.31	3.19	1.48	1.63
6	Kab. Padang Pariaman	23.38	6.61	13.36	0.03	0.06	9.51	11.41	12.72	0.90	5.24	1.70	1.16	0.09	5.69	5.93	0.78	1.41
7	Kab. Agam	30.18	3.50	11.08	0.02	0.05	7.56	19.11	6.53	0.63	7.51	1.21	1.87	0.04	3.86	4.90	1.23	0.72
8	Kab. Lima Puluh Kota	32.86	7.57	7.19	0.02	0.03	4.93	15.80	9.88	0.57	6.75	1.58	1.16	0.03	5.71	3.11	1.64	1.16
9	Kab. Pasaman	48.55	1.87	4.23	0.02	0.11	4.58	14.14	4.43	0.75	6.17	2.27	1.37	0.05	6.97	2.51	1.10	0.88
10	Kab. Solok Selatan	29.86	7.90	4.92	0.02	0.05	11.90	20.28	6.29	0.71	6.74	0.77	0.83	0.02	4.79	2.45	1.33	1.13
11	Kab. Dharmasraya	28.71	7.58	5.46	0.02	0.01	13.15	14.15	5.87	0.73	8.70	2.05	2.14	0.02	6.06	2.78	1.86	0.73
12	Kab. Pasaman Barat	42.89	1.51	14.21	0.02	0.01	6.30	11.79	4.69	0.48	7.14	1.70	1.42	0.05	3.54	2.43	1.27	0.56
13	Kota Padang	4.85	2.92	12.90	0.10	0.16	9.80	17.01	16.20	0.90	10.79	4.68	3.03	1.44	5.93	5.25	1.84	2.19
14	Kota Solok	5.31	0.58	4.83	0.05	0.20	12.41	25.51	15.44	1.89	9.04	4.10	2.56	0.02	8.31	5.52	1.63	2.62
15	Kota Sawahlunto	7.70	7.19	11.14	2.09	0.49	10.50	15.94	8.46	1.66	9.49	3.34	1.71	0.13	11.75	3.05	1.50	4.86
16	Kota Padang Panjang	4.87	0.23	9.26	0.06	0.26	9.28	18.38	12.69	2.07	11.99	3.85	3.48	0.08	8.98	9.08	1.50	3.93
17	Kota Bukittinggi	1.16	0.00	5.97	0.68	0.15	6.59	33.70	10.83	3.68	9.34	5.44	3.29	0.65	5.54	5.73	3.80	3.44
18	Kota Payakumbuh	6.21	0.50	5.34	0.06	0.31	12.67	23.85	12.54	2.49	10.89	5.83	2.79	0.26	6.82	4.49	1.74	3.21
19	Kota Pariaman	17.07	1.76	7.71	0.06	0.04	14.88	16.17	10.21	1.74	10.90	2.75	2.81	0.14	5.59	4.11	1.29	2.78

Sumber : Analisis Tahun 2021

Keterangan :

A = Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

B = Pertambangan dan Penggalian

C = Industri Pengolahan

D = Pengadaan Listrik dan Gas

E = Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

F = Konstruksi

G = Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

H = Transportasi dan Pergudangan

I = Penyediaan Akomodasi dan Makan Minu

J = Informasi dan Komunikasi

K = Jasa Keuangan dan Asuransi

L = Real Estate

M,N = Jasa Perusahaan

O = Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

P = Jasa Pendidikan

Q = Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

R,S,T,U = Jasa Lainnya